PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

TAHUN 2021 - 2026

Alamat ; Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 62 Telp. 0565 (21607)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten SintangTahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021- 2026 menjabarkan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang hendak dicapai yang mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang terpilih periode 2021-2026.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan diwaktu yang akan datang. Besar harapan kami semoga Renstra ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kemudahan dan kelancaran atas semua upaya yang akan kita kerjakan bersama.

Sintang, Juli 202
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sntang

Ir. Elisa Gultom, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661103 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud danTujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 10

2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 36

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 50

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang 52

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG

3.1 Identifikasi Permasahalan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang 55

3.2 TelaahanVisi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 60

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis 55

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 67

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 68

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 70

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 72

BAB VII PENUTUP 73

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 **Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang** 34

TABEL 2.2 **Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang** 36

TABEL 2.2.1 Data Keadaan Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 36

TABEL 2.2.2 Jumlah PNS dan CPNS pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Berdasarkan Golongan 37

TABEL 2.2.3 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Posisi Per Juni 2020). 38

TABEL 2.2.4 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Struktural. 38

TABEL 2.2.5 Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Sintang Menurut Status Tahun 2020 38

TABEL **Sarana dan Prasarana (** Aset yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang).. 40

TABEL 2.2.6 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2020. 42

TABEL 2.2.7 Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 44

TABEL 2.2.8 Data Luas Tanam dan Panen tanaman Pangan Dikabupaten Sintang 2016-2020 47

TABEL 2.2.9 Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat Tahun 2020 48

TABEL 2.2.10 Data populasi unggas dan jenis unggas di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020 49

TABEL 2.2.11 Populasi dan jenis Ternak di Kabupaten Sintang 50

TABEL 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan 55

TABEL 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. . . . 61

TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 67

TABEL 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 69

TABEL 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 71

TABEL 7.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 72

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kepala Daerah diharuskan untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa jabatan 5 tahunan yang dijabarkan OPD dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi bupati dan wakil bupati terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra OPD disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera.

2 Rencana besar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang merupakan dokumen yang memuat kebijakan-kebijakan dengan sasaran yang masih bersifat makro kabupaten, untuk itu setiap OPD menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran yang bersifat dokumen operasional 5 tahunan sesuai dengan urusan yang diampu. Kedudukan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan sangatlah penting artinya bagi semua Stake holder lingkup Pertanian dan Perkebunan karena merupakan pedoman yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang selama 5 tahun. Arah kebijakan pembangunan pertanian dan Perkebunan selama 5 tahun dapat diketahui dan selanjutnya dipergunakan oleh semua komponen pelaku pembangunan khususnya pertanian dan perkebunan. Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan dilakukan melalui tahapan- hapan sebagi berikut: persiapan penyusunan dengan menggali masukan-masukan dari intern Dinas Pertanian

dan Perkebunan kemudian dirangkum menjadi rancangan awal Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan pertanian di Kabupaten Sintang untuk menjaring kebutuhan masyarakat dan strategi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan menjadi rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang. Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja OPD), yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

1.1. Dokumen-dokumen perencanaan seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, Recana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020–2024, RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018–2023, RPJMD Kabupaten Sintang 2021-2026 dan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan 2021-2026 merupakan dokumen yang saling berkaitan, selanjutnya Keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya,

1.2. Landasam Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan aspirasi masyarakat pertanian yang telah diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 dan telah sejalan dengan beberapa landasan hukum berikut ini :

1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perrencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunn Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lemabaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);

9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lebarab Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan encapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781)
22) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 80 Tahun 2017 tentang PembentukanProduk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
27) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat;
29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahn Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
31) Peratura Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
32) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor5);
33) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

34) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;

35) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7).

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sintang di bidang pertanian dan perkebunan serta disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1) Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
2) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam jangka menengah.
3) Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2021 – 2026 adalah :

1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang.

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis yang berisikan pengertian ringkasan tentang renstra, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, sumberdaya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kinerja pelayanan yang telah dan akan dilakukan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), telaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2021-2026; telaahan renstra Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam rangkaian kebijakan sehingga tujuan dan sasaran akan tercapai.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang tabel-tabel program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, dan target kinerja program serta pendanaannya.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG

2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

2.1.1 Tugas Pokok

Dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, dimana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang memiliki Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagaimana di bawah ini.

Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pertanian dan Perkebunan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di Bidang Pertanian dan Perkebunan;
c. Pembinaan UPTD di Bidang Pertanian danPerkebunan;
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan prorgam, Ketatalaksanaan, Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Rumah tangga, Perlengkapan, Humas dan Arsip Dinas Pertanian dan Perkebunan;
e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) DI Bidang Peratian dan Perkebunan;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
g. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Pertanian dan Perkebunan;

h. PenyusunanPerjanjian Kinerja di Bidang Pertanian dan Perkebunan;

i. Penyusunan Analisa Jabtan;

j. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;

k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.

A. **Kepala Dinas** mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Penetapan Program Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan;

b. Perumusan kebijakan teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan;

c. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang Pertanian dan Perkebunan;

d. Pengendalian kegiatan sekretariat, Bidang Pertanian, Perkebunan, sarana prasarana dan perlindungan tanaman, Bidang Peternakan dan Bidang Penyuluhan;

e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Sarana Prasarana, Peternakan dan Penyuluhan;

f. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;

g. Penyampaian hasil analisa Jabatan kepada Bupati;

h. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Sarana Prasarana, Peternakan dan Penyuluhan;

i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pertanian dan Perkebunan;

j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Pertanian dan Perkebunan;

k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di Bidang Pertanian dan Perkebunan;

l. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporanterhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

m. Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. **Sekretariat** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, Aparatur, Keuangan, Arsip, Perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas di maksud Sekretariat mempunyai funsi:

a. Penyusunan Perencanaan dan Program kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan;

b. Pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan, Arsip dan barang;

c. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Perencanaan kegiatan Bidang pada Dinas Pertanian dan Perkebunan;

d. Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, Kepegawaian, Keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan;

f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan di ajukan kepada Kepala Dinas;

g. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan,evaluasi dan memberi petunjuk

serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;

h. Pengoordinasian dan penyusunan laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan;

i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan;

j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak;

k. Pelaksanaan tugas lainya yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok : melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan Program kerja serta laporan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Subbag Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program Kerja tahunan pada subbag keuangan dan program ;
b. Pelaksanaan tugas administrasi di bidang Keuangan dan Program Dinas Pertanian dan Perkebunan.
c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan.
d. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Penyiapan usulan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
f. Penyiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
g. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan program.
h. Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan, program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan

belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan.

i. Penyiapan dan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Kas, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan RKT, dan laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

j. Pelaksanaan dan pengelolaan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

k. Penyelenggaraan penelitian dan verfikasi surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

l. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai Tugas Pokok : Melksanakan urusan surat menyurat, kehumasan,kearsipan,kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian umum dan aparatur ;

b) Pelaksanaan tugas Sekretaris Dinas dibidang umum dan aparatur ;

c) Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat /naskah Dinas ;

d) Pengumpulan bahan dan penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

e) Kegiatan kegiatan pelaksanaan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas,Keputusan Kepala Badan, dan atau Surat Lainnya, cuti, Daftar Urut Kepangkatan,Daftar Nominatif,formasi dan

pengolahan data pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun,Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan kegiatan lain-laian yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang – undangan.

f) Penyusunan dan penyiapan , mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

g) Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.

h) Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;

i) Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas aparatur dan umum;

j) Pelaksanaan pengolahan data, urusan surat menyurat keprotokolan, kearsipan dan kepustakaan; dan

k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang yang berada pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Untuk pelaksanaan tugasnya Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan Program kerja tahunan pada Sub Bagian Perelengkapan;

b) Pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan;

c) Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan;

d) Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Pertanian dan Perkebunan;

e) Pelaksanaan penata usahaan aset Dinas ;

f) Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit

(RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) daan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

g) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan;

h) Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan;

i) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan barang milik daerah yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan;

j) Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan ;

k) Pemberian saran dan pertimbangan serta lapran kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak ; dan

l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

C. **Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura** mempunyai tugas pokok : melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem,fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Untuk pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
3. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
4. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan dibidang tanaman pangan ;
5. Pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang tanaman pangan ;
6. Pemberian bimbingan penerpan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan ;.
7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana

alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan ;

8. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan ;.
9. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan ;
10. Pelaksanaan analaisa usaha tani Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
11. Pembinaan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
12. Pelaksanaan evaluasi tanam dan panen serta menyusun laporan statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
13. Pelaksanaan pengembangan potensi daerah/SINTANG maupun lahan kering ;
14. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana peralatan pertanian ;
15. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas ;
16. Pelaksanaan membimbing,mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
17. Pendistribusian dan pengkoordinasikan tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
18. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak ;
19. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Seksi Produksi Tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi :

1. Perumusan Program kerja Seksi Produksi Tanaman pangan dan hortikultura;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Produksi Tanaman pangan dan hortikultura;
3. Pengumpulan bahan dan pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan bimbingan teknis penangkar

benih bersertifikat dan peredaran benih serta bibit ;

5. Penyaluran benih tingkat benih sebar ;
6. Pelaksanaan monotoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman buah – buahan, sayuran dan tanaman hias ; .
7. Pelaksanaan identifikasi pengembangan hortikultura ;
8. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap penangkar bibit hortikultura ;
9. Pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pola usaha tani Tanaman pangan dan hortikultura;
10. Penyaluran bibit hortikultura ;
11. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas;
12. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
13. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Seksi Pengelolaan lahan dan Air mempunyai tugas : Mengumpul, mengolah dan merumuskan bahyan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, koordinasi elaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan lahan dan air :

Untuk melaksanakan Tugasnya Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi ;

1. Penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Lahan dan Air ;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma ,standar prosedur,dan kreteria di bidang Pengelolaan Lahan dan Air ;
3. Pelaksanaan inventarisasi dan identivikasi ptensi pengembangan Lahan Pertanian ;
4. Pengumpulan dan Penyusunan bahan identifikasi potensi penglolaan air dan pendayagunaan air sesuai agoekosistem ;
5. Pelaksanaan survey identivikasi daerah dalam mengembangkan jaringan

irigasi desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani ;

6. Pelaksanaan pengembangan potensi pertanian melalui pengembangan daerah rawa/SINTANG ;
7. Pelaksanaan pembangunan sumber pengairan pertanian lainnya ;
8. Pelaksanaan pembangunan aksebilitas produk – produk pertanian ;
9. Pengumpulan bahan, analisis dan bimbingan teknis dalam upaya menumbuh kembangkan Kelompok Petani Pengguna dan pengelola air (KP3A);
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas : merencanakan, menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, melakukan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi sarana Prasarana Pertanian mempunyai Fungsi :

a. Penyusunan Program Kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian ;
b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar,prosedur,dan kreteria di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian ;
c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan alat dan mesin pertranian ;
d. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian ;
e. Pengembangan potensi pengelolaan lahan dan irigasi pertanian ;
f. Penyediaan , pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk,pestisida serta alat dan mesin pertanian ;
g. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian ;
h. Pemberian failitas investasi pertanian ;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
J. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan

tugas dan fungsinya ;

D. **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;.
2. Penyiapan bahan perumusan .dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang peternakan dan kesahatan hewan ;
3. Penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan,perlindungan serta dan kreteria dibidang Peternakan dan kesehatan hewan ;
4. Pengelolan sumber Daya genetik hewan ;.
5. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit, ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak ;
6. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak ; .
7. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
8. Pegawasan peredaran dan pengggunaan serta sertifikat benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak; dan

   Pakan ,hijauan pakan ternak dan obat hewan ;
9. Pengawasan pemasukan dan pengluaran hewan, dan produk hewan;
10. Pelaksanaan sertivikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan ;
11. Pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan,kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
12. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;
13. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan ;
14. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan ; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Seksi Benih/Bibit dan Produksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kabijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit ,pakan, dan prodiksi dibidang peternakan ;

Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai fungsi ;

a. Penyusunan program kerja Seksi Benih/bibit dan produksi ;
b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang benih/bibit dan produksi ;
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana adan anggaran seksi benih/ bibit dan produksi ;
d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan dan produksi dibidang peternakan ;
e. Penyiapan bahan, penyediuaan dan peredaran pakan ,benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) ;
f. Penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT) ;
g. Penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan,benih /bibit HPT ;
h. Penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT ;
i. Penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian ;
j. Pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak ;
k. Penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak ;
l. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi benih/bibit dan produksi peternakan ; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai Tugas : Melakukan Penyiapan bahan penyusunan kejakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan nevaluasi dibidang kesehatan hewan ;

Untuk pelaksanaan tugasnya Seksi Kesehatan Hewan mempunyai Fungsi :

a. Penyusunaan Program kerja Seksi Kesehatan Hewan ;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan ;
c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan ;
d. Penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor ;
e. Penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
f. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan ;
g. Penyelenggaraan fasilitasiu unit pelayanan kesehatan hewan ;
h. Penyiapan bahan penanggulangan ,penutupan dan pembukaan daerah wabah daerah penyakit hewan menular ;
i. Penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan ;
j. Penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan ;
k. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Kesehatan Hewan ;
l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya ;

Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;

Untuk Melaksanakan tugasnya Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai Fungsi :

a. Penyusunaan Program kerja Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;

d. Penyiapan bahan Penilaian penerapan penanganan limbah dampak,higiene dan sanitasi usaha produk hewan ;
e. Pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil ;
f. Penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/ atau pemasukan produk hewan ;
g. Pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan ;
h. Penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan ;
i. Penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis ;
j. Penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban ;
k. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
l. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
m. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Peternakan dan kesehatan hewan ;
n. Pelayanan pengembangan informasi pasar dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
o. Penyelenggaraan fasilitasi promosi produk dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
p. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan ;
q. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan ;
r. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Kesehatan Masayarakat Veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan ;
s. Pelaksanaan tugas lainnya yang duberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

E. Bidang Pengembangan Perkebunan mempunyai Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan perkebunan .

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program kerja Bidang Pengembangan Perkebunan ;
b. Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan ,produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, bimbingan usaha,kemitraan dan kelembagaan perkebunan serta pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
c. Penyusunan rencana pengembangan dibidang perkebunan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi ;
d. Pemberian bimbingan penerpan peningkatan produksi dibidang perkebunan ;
e. Pemberian bimbingan pengolahan hasil dan pemasaran hasil di bidang perkebunan ;
f. Pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi dibidang perkebunan ;
g. Pemberian bimbingan usaha dan kemitraan serta kelembagaan dibidang perkebunan ;
h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang perkebunan ;
i. Penangulangan ganguan usaha, dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan ;
j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang produksi ,kelembagaan dan ganguan usaha perkebunan ; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemeberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan produksi perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program Kerja Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
b. Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Pengembangan dan Produksi Perkebunan ;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penegembangan perkebunan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi dan kebijakan peningkatan mutu, produksi dan produktivitas komodity perkebunan ;
e. Penyiapan rencana pengembangan perkebunan dan peningkatan mutu dan produksi perkebunan ;
f. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan ;
g. Penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tataguna lahan perkebunan ;
h. Penyiapan bahan bimbingan peningkatan mutu produksi dan produktivitas perkebunan ;
i. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan ;
j. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang perkebunan ;
k. Penyiapan dan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang perkebunan ;
l. Pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyajian data statistik perkebunan ;
m. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan dan produksi perkebunan ; dan
n. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta peraturan dan evaluasi di bidang bimbingan usaha,kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program Kerja Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan

Kelembagaan Perkebunan;

b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang bimbingan usaha kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;
c. Penyusunan norma,standar, prosedur dan kreteria di bidang bimbingan usaha, kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;
d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bimbingan usaha, Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan proses perizinan, pendaftaran dan rekomendasi dan usaha perkebunan ;
g. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama kemitraan usaha perkebunan ;
h. Pembinaan kelembagaan perkebunan ;
i. Pelaksanaan penilaian fisik dan teknis kebun kemitraan ;
j. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang perkebunan
k. Penyelenggaraan fasilitasi promosi produk bidang perkebunan ;
l. Penyiapan bahan bimbingan teknis pemasaran hasil dibidang perkebunan
m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil dibidang perkebunan ;
n. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

Seksi Pengawasan dan ganguan usaha perkebunan mempunyai tugas : melakukan penyiapan dan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengawasan dan ganguan usaha perkebunan .

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengawasan dan ganguan usaha perkebunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program kerja Seksi Pengawasan dan ganguan usaha perkebunan ;

b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang Pengawasan dan ganguan usaha perkebunan ;
d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengawasan dan ganguan usaha perkebunan ;
e. Penyiapan bahan panyusunan kebijakan di bidang Pengawasan dan ganguan usaha perkebunan ;
f. Penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi usaha dibidang perkebunan ;
g. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan SDA/lahan secara lestari;
h. Peenyelenggaraan penilaian usaha perkebunan ;
i. Pencegahan dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan ;
j. Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian gangguan usaha perkebunan ;
k. Penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan terhadap kebakaran kebun dan lahan;
l. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit dinas terkait ;
m. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengawasan dan ganguan usaha perkebunan;
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

F. Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tananaman Perkebunan :

Pada Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tananaman Perkebunan mempunyai Tugas : melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang sarana, prasarana dan perlindungan tanaman perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tananaman Perkebunan mempunyai fungsi ;

a. Penyusunan program kerja bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tananaman Perkebunan;
b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang sarana, prasarana dan

perlindungan tanaman perkebunan ;

c. Penyiapan bahan panyusunan kebijakan di bidang perbenihan perkebunan, saranaa dan prasarana perkebunan, pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan ;

d. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang perkebunan ;

e. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan ;

f. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan pestisida di bidang perkebunan ;

g. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan ;

h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan ;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana, perbenihan , perlindungan tanaman perkebunan ; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan,dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang sarana dan prasarana perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sarana dan prasarana Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;

b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;

d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi perkebunan ;

e. Penyediaan lahan, jalan usaha tani, jeringan irigasi tersier, embung bangunan perkebunan, alat dan mesin perkebunan ;

f. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

Seksi Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pementauan dan evaluasi di bidang perbenihan perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perbenihan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program kerja Seksi Perbenihan Perkebunan ;
b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang perbenihan Perkebunan ;
c. Penyusunan norma , standar, prosedur dan kreteria di bidang perbenihan perkebunan ;
d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perkebunan ;
e. Penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih/bibit di bidang perkebunan ;
f. Pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit tanaman perkebunan ;
g. Perencanaan kebutuhan benih/bibit dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan ;
h. Penyiapan bahan bimbingan produksi benih/bibit dan kelembagaan perbenihan dibidang perkebunan ;
i. Pemberian bimbingan teknis perbenihan dibidang perkebunan ;
j. Penyusunan pelaporan dan pendomentasian kegiatan seksi Perbenihan perkebunan ; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

Seksi Perlindungan Tanaman perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

mempunyai fungsi ;

a. Penyusunan Program kerja seksi Perlindungan Tanaman perkebunan ;1 `
b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman perkebunan ;
c. Penyusunan norma, standar,prosedur dan kreteria di bidang Perlindungan Tanaman perkebunan ;
d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dibidang perkebunan ;
e. Pengelolaan data organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan ;
f. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan ;
g. Penyiapan bahan Sekolah Lapang pengendalian hama terpadu dibidang perkebunan ;
h. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan ilkim dibidang perkebunan ;
i. Penyiapan bahan penangulangan bencana alam dibidang perkebunan ;
j. Pemberian bimbingan teknis perlindungan tanaman di bidang perkebunan ;
k. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Perlindungan Tanaman perkebunann; dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan, programa dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program kerja Bidang Penyuluhan ;
b. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bIdang tugasnya ;
c. Penyusunan kebijakan dan programa dibidang penyuluhan pertanian ;
d. Pelaksanaan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidang pertanian ;

e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
f. Peningkatan kafasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta ;
g. Pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyuluhan pertanian ; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan penyuluhan Pertanian mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemebrian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan penyuluhan pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Kelembagaan penyuluhan pertanian mempunyai fungsi ;

a. Penyusunan Program kerja Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ;
b. Perumusan Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian ;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang ketenagaan Penyuluhan Pertanian ;
d. Penyusunan dan pengelolaan data base dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian ;
e. Penyiapan bahan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ;
f. Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian ;
g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian ;
h. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang metode dan

informasi penyuluhan pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
d. Penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian ;
e. Penyusunan Materi dan pengembangan metodelogi dibidang penyuluhan pertanian ;
f. Penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian ;
g. Penyiapan bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian ;
h. Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi dibidang penyuluhan pertanian ;
i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode,dan Informasi penyuluhan pertanian ; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mempunyai tugas : melaksanakan sebagaian tugas operasional Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam Bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTD ;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

1) Kelompok Jabatan Fungsioanal terdiri dari Sejumlah Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu ;
2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Bupati Sintang ;
3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ,
4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud diatur sesuai perraturan perundang - undangan ;

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

II. Sekretariat :

1. Sub Bagian Keuangan dan Program;
2. Sub Bagian Aparatur dan Umum;
3. Sub Bagian Perlengkapan.

III. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura :

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian.

IV. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Terdiri dari :

1. Seksi Bibit dan Produksi;
2. Seksi Kesehatan Hewan;
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengelolaan dan Pemasaran

Hasil Peternakan.

V. Bidang Pengembangan Perkebunan :

1. Seksi Pengembangan dan Produksi Perkebunan;
2. Seksi Bimbingan usaha, kemitraan dan kelembagaan perkebunan;
3. Seksi Pengawan dan Gangguan Usaha Perkebunan.

VI. Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
2. Seksi Perbenihan Perkebunan;
3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

VII. Bidang Penyuluhan :

1. Seksi Kelembagan Penyuluh Pertanian;
2. Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian;
3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

VIII. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

IX. Kelompok Jabatan Funsional.

Grafik 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut :

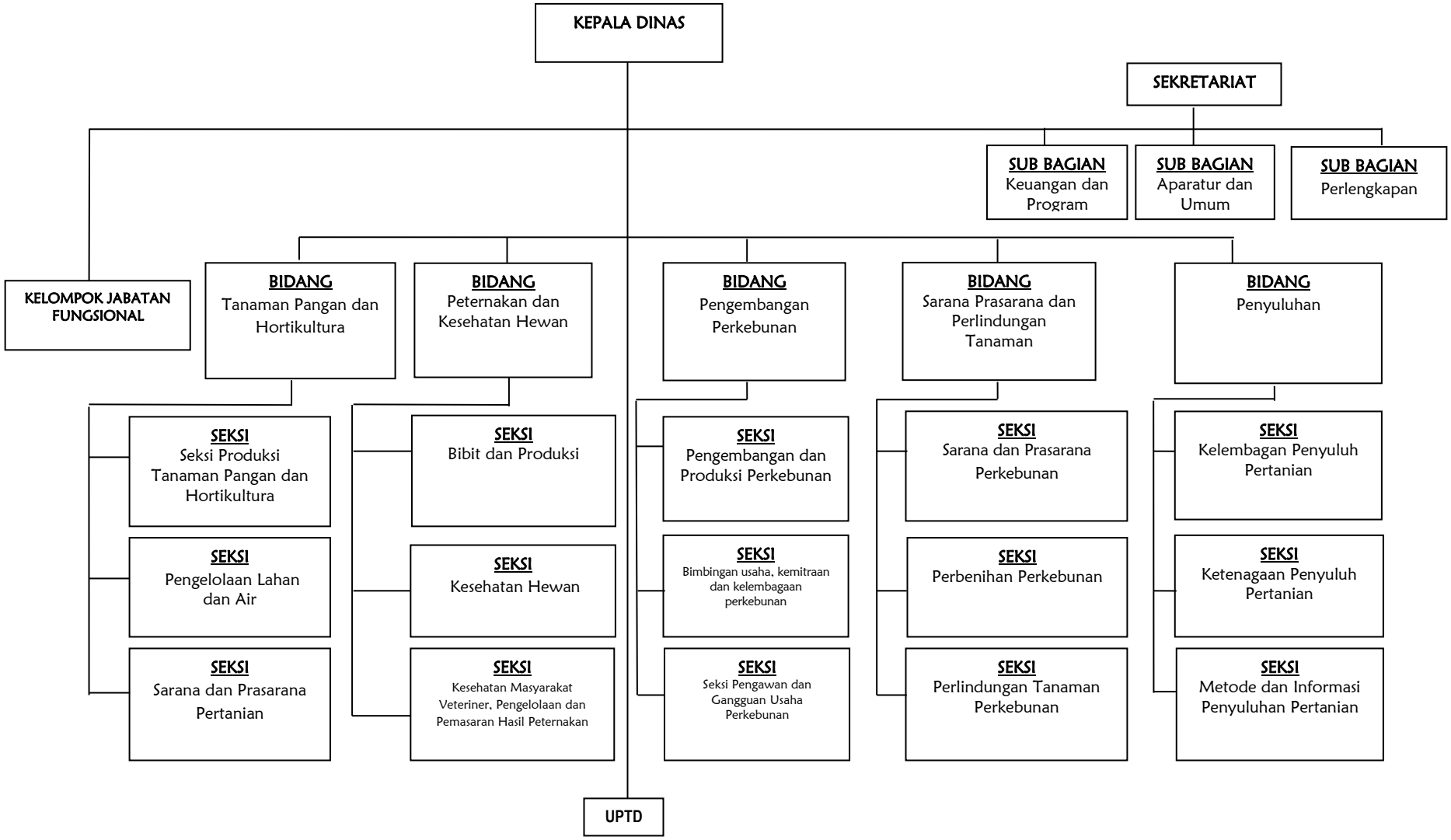

2.2. Sumberdaya Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

1) Sumberdaya Manusia

a) Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

Untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam pelaksanaannya tugas didukung oleh 154 orang PNS, terdiri dari PNS Struktural sebanyak 25 Orang, PNS Fungsional umum sebanyak 20 orang, Jabatan Fungsional sebanyak 92 orang, P3K sebanyak 17 orang.

Tabel 2.2.1 Data Keadaan Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	11
2	Sarjana (S1)	103
3	Diploma	8
4	SLTA	32
5	SLTP	-
	Jumlah	**154**

Keadaan Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang berdasarkan tingkat dan jenjang pendidikannya yaitu yang berpendidikan Strata 2 (S2) 11 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 99 orang, Diploma III (D.3) sebanyak 8 orang, lulusan SLTA sebanyak 32 orang.

Dari data di atas terlihat bahwa jajaran pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan masih perlu ditambah jumlahnya dan terus ditingkatkan jenjang pendidikannya dalam rangka peningkatan SDM pertanian, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja yang lebih baik.

Adapun jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.2.2 Jumlah PNS dan CPNS pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Berdasarkan Golongan.

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV.C)	1
	Pembina Tingkat .I (IV/b)	2
	Pembina (IV/a)	17
	Jumlah	**20**
2	Penata Tk I (III/d)	28
	Penata (III/c)	31
	Penata Muda Tk. I (III/b)	19
	Penata Muda (III/a)	21
	Jumlah	**99**
3	Pengatur Tk. I (II/d)	5
	Pengatur (II/c)	4
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	PengaturMuda (II/a)	8
	Jumlah	**18**

4	**Golongan P3K (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak)**	-
	Penata Muda Golongan IX	13
	Pengatur Muda Golongan V	4
	Jumlah	**17**
	Jumlah Keseluruhan	**154**

Tabel 2.2.3 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

(Posisi Per Juni 2020)

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	104
2	Perempuan	50
Jumlah		154

Tabel 2.2.4 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Struktural

NO	Jenis Diklat	Jumlah
1	Spamen/Diklatpim II	1
2	Spama/Diklatim III	2
3	Adum/Diklatim IV	11

Jumlah	14

Tabel 2.2. 5 Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Sintang Menurut Status Tahun 2020

NO	Keadaan Pegawai	STATUS PEGAWAI			Jumlah
		Pusat DPK	Pusat DPB	Daerah	
1	2	3	4	5	6
1.	Pegawai Negeri Sipil	-	-	137	137
2.	Calon PNS	-	-	6	6
3.	Tenaga Honorer	-	-	30	30
	Jumlah			**187**	**187**

Berdasarkan data-data diatas, diketahui bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang memiliki jumlah sumber daya aparatur yang terbatas khususnya tenaga penyuluh lapangan (PPL) bila dibandingkan dengan jumlah desa binaan yang mencapai 390 Desa dan 16 Kelurahan. Hal ini diperlukan adanya penambahan jumlah pegawai (SDM) dan peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang Pertanian dan Perkebunan.

Sarana dan Prasarana

Aset yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mulai dari bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor, peralatan elektronik dan lain-lain. Aset-aset tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Fisik Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71 unit	71	-	-
2.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	66 buah	61	-	4
3.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	5 buah	4	-	1
4.	Komputer / PC	16 buah	14	-	2
5.	Komputer NoteBook	21 buah	15	-	6
6.	Printer	37 unit	36	-	1
7.	Kamera / HandyCam	12 unit	11	-	1
8.	LCD Infocus	6 unit	6	-	-
9	Meja 1 Biro	114 buah	114	-	-
10	Meja Rapat	49 buah	49	-	-
11	Meja Kayu	2 buah	2	-	-
.	Meja Kerja Pejabat	2 buah	2	-	-
12	Meja Sambung Rapat	1 buah	1	-	-
.	Meja Evicerasi	2 buah	2	-	-
13	Meja Cuci Daging	2 buah	2	-	-
.	Kursi Besi	23 set	23	-	-
14	Kursi Direksi	7 set	7	-	-
.	Kuris Lipat	81 set	81	-	-
15	Kursi Putar	28 set	28	-	-
.	Kursi Putar Jenis Direktur	3 set	3	-	-
16	Kursi Direksi Tipe Kerja	12 set	12	-	-
.	Kursi Pejabat Eselon	2 set	2	-	-
17	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	1 set	1	-	-
.	Kursi Rapat	2 set	1		
18	Kursi Rapat dan Kursi Kerja	57 set	2	-	55
.	Kursi Komputer	9 set	9	-	-
19	Kursi Tamu	11 set	7	-	4
.	Kursi Tamu Ukur + Sofa	3 Set	3	-	-
20	Sofa Kursi Tamu	2 Set	2	-	-

.	Papan Tulis White board	6 buah	3	-	3
21	Global Positioning System (GPS)	11 Buah	11	-	-
.	Peralatan Studio Audio	8 Buah	7	-	1
22	Rak Arsip	8 Buah	8	-	-
.	Rak Kayu	4 Buah	4	-	-
23	Rak Buku	1 Buah	1	-	-
.	Rak Aquarium	1 Buah	1	-	-
24	Kipas Angin	7 Buah	1	-	6
.	Antena Ectoral	1 Buah	-	-	1
25	Brankas	1 Buah	1	-	-
.	Cutter Bon	2 Buah	2	-	-
26	Cutter Daging Ayam	1 Buah	1	-	-
.	Gorden	1 Paket	1	-	-
27	HardDrive Wifi	1 Buah	1	-	-
.	Kompor Gas	1 Buah	1	-	-
28	Kompas	1 Buah	-	-	1
.	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	1	-	-
29	UPS	1 Unit	1	-	-
.	Pompa (Paket)	1 Unit	1	-	-
30	Sirene Mobil	1 Unit	1	-	-
.	Toolkit	1 Unit	1	-	-
31	Tangga Alumunium	1 Unit	1	-	-
.	Tong Air	1 Buah	1	-	-
32	Tabung Gas	1 Buah	1	-	-
.	FaxMail	1 Buah	-	-	1
33	TV	1 Buah	-	-	1
.	Parabola/Receiver	1 Set	-	-	1
34	AC Split	26 Buah	22	-	4
.	Alat Laboratorium	13 Unit	13	-	-
35.	Alat Kedokteran Poliklinik	31 Buah	31	-	-

Sumber : SIMBADA Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 2021

b) Data Kecamatan, Kelurahan dan Desa Se- Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah 21.635 Km^2 dengan jumlah penduduk 421.306 jiwa, terdiri dari 14 Kecamatan yang meliputi 390 desa, dan 16 kelurahan. Data administrasi Pemerintahan di Kabupaten Sintang tahun 2020 dapat di lihat pada Tabel 2.2.6 berikut ini.

Tabel 2.2.6 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Ambalau	33	-
2	Binjai Hulu	11	-
3	Dedai	31	-
4	Kayan Hilir	43	-
5	Kayan Hulu	31	-
6	Kelam Permai	17	-
7	Ketungau Hilir	24	-
8	Ketungau Hulu	29	-
9	Ketungau Tengah	29	-
10	Serawai	38	-
11	Sepauk	39	-
12	Sintang	13	16
13	Sungai Tebelian	26	-
14	Tempunak	26	-
	Jumlah	**390**	**16**

Sumber Data: BPS Kabupaten Sintang 2020

Berdasarkan data-data diatas, diketahui bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang memiliki jumlah sumber daya aparatur yang

terbatas khususnya tenaga penyuluh lapangan (PPL) bila dibandingkan dengan jumlah desa binaan yang mencapai 390 desa dan 16 kelurahan. Hal ini diperlukan adanya penambahan jumlah pegawai (SDM), peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang Pertanian dan Perkebunan.

c) Petani dan Kelompok Tani

Secara umum pembinaan dan penyuluhan pertanian di Kabupaten Sintang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para petani, agar dapat meningkatkan kemampuan, peranan dan peran serta petani sebagai subjek pembangunan pertanian dan perkebunan dalam upaya mencapai pertanian yang tangguh dan mandiri. Dengan demikian upaya dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian dan perkebunan harus di fokuskan di pedesaan, terutama dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi melalui kegiatan penyuluhan pertanian dan perkebunan serta perluasan lapangan kerja. Dalam rangka menunjang pembangunan dibidang pertanian dan perkebunan dan sangat erat kaitannya dengan kondisi petani, baik dari tingkat pengetahun, sikap dan keterampilan, sosial budaya, maupun dari aspek pemilikan lahan dan modal usaha tani, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi usaha tani, oleh karena itu, peningkatan kemampuan petani perlu terus ditingkatkan.

Penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2020 berjumlah 421.306 jiwa yang terdiri dari laki laki 217.921 jiwa dan perempuan 203.385 jiwa. Sebagian diantaranya sudah tergabung dalam wadah kelompok tani dengan rata-rata anggota masing-masing kelompoknya berjumlah 50-200 orang per kelompok/Kecamatan. Pengelompokan petani yang tergabung dalam wadah kelompok tani tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pembinaan, transfer teknologi dan penyampaian informasi sejalan dengan laju perkembangan teknologi pembangunan pertanian.

Pembentukan kelompok tani dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan kepada para petani dan sekaligus kelompok tani tersebut berfungsi sebagai kelas belajar, atau wahana kerja sama dan sebagai unit produksi, terutama dalam meningkatkan

efektifitas dan efisiensi pengelolaan usahatani. Kelompok tani adalah mitra kerja penyuluh, atau penyuluh swadaya sebagai penggerak dan pemrakarsa dalam rangka mentransfer teknologi pertanian kepada anggota kelompoknya berupa percontohan-percontohan atau model usaha tani yang menerapkan teknologi baru. Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2.2.7 Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Sintang pada tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Kelompok
	Kelompok Tani :	
1	Kecamatan Ambalau	54
2	Kecamatan Binjai Hulu	78
3	Kecamatan Dedai	203
4	Kecamatan Kayan Hilir	268
5	Kecamatan Kaya Hulu	84
6	Kecamatan Kelam Permai	191
7	Kecamatan Ketungau Hilir	98
8	Kecamatan Ketungau Hulu	91
9	Kecamatan Ketungau Tengah	125
10	Kecamatan Sepauk	278
11	Kecamatan Serawai	83
12	Kecamatan Sintang	62
13	Kecamatan Tebelian	134
14	Kecamatan Tempunak	208

Sumber : Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan PerkebunanKabupaten Sintang (2020)

d) Penyuluhan Pertanian dan Perkebunan

Penyuluhan Pertanian dan Perkebunan adalah system Pendidikan di luar sekolah bagi petani dan anggota, agar berubah prilakunya untuk bertani lebih baik, berusaha tani lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera dan bermasyarakat lebih baik.

Tujuan Penyuluhan pertanian dan Perkebunan adalah mengubah prilaku petani dan anggota keluarganya, yaitu mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Hal ini merupakan pintu gerbang terjadinya penghayatan dan penerapan (adopsi) pembaharuan (inovasi) dari pertanian dan Perkebunan yang disuluhkan. Penyuluhan Pertanian dan Perkebunan mempunyai misi, yaitu (1) bertani lebih baik (better farming); (2) berusaha tani lebih menguntungkan (better business); (3) hidup lebih sejahtera (better living); dan (4) membentuk masyarakat tani yang lebih sejahtera(better community).

2) Sumber Daya Alam

Luas wilayah Kabupaten Sintang adalah 21.635 km2 dan menjadikannya Kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten terluas pertama adalah Kabupaten Ketapang dan di susul oleh Kabupaten Kapuas Hulu. Jika di hitung jarak dari kota pontianak, ibu kota provinsi ke kabupaten Sintang adalah sekitar 395 km2, Kabupaten Sintang di bagi menjadi 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa. Secara administratif Kabuapten Sintang berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu:

Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu

Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi.

Timur : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Barat : Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sanggau.

Posisi letak geografis Kabupaten Sintang terletak diantara 1°05' Lintang Utara hingga 0°46' Lintang Selatan dan 110°51' sampai 113,20' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km2 atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km2). Kabupaten Sintang juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi berkisar pada

249,08 milimeter perbulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari perbulan. Kabupaten Sintang juga berada di daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi.

Kondisi geografis dapat di lihat dari alur sungai besar yang melalui Kabupaten Sintang, yaitu sungai kapuas dan sungai melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi yaitu: gunung batu raya, (tinggi 2.278m) di kecamatan serawai, gunung batu maherabut (tinggi 1.270m), gunung batu baluran (tinggi 1.556 m), dan gunung batu sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Kabupaten Sintang memiliki beberapa potensi alam seperti air terjun sebanyak 19 air terjunyang tersebar di tujuh kecamatan yaitu: Sepauk, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau. Di Kabupaten Sintang juga terdapat jenis batuan yang mendominasi adalah di Tebidah seluas 410.448,58 ha atau mencapai 18,61% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di Kecamatan Ambalau, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sepauk, Serawai, Sintang, Sungai Tebelian dan Tempunak. jenis tanah, iklim, jenis penggunaan tanah/lahan dan lain lain.

3) Sumber daya Pertanian

Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang ketersediannya merupakan salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya proses produksi usaha tani, baik usaha pertanian maupun perkebunan. Produktivitas lahan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah, topografi, tekstur tanah, ketersediaan air, unsur hara dan iklim yang cocok.

Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Sintang adalah padi dan jagung. Pada Tahun 2020 luas tanam padi dan jagung mengalami penurunan di bandingkan tahun 2019, selanjutnya luas panen padi dan jagung pada tahun 2020 mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2019. Data Luas Tanam dan Panen Pertanian di Kabupaten Sintang dan Penggunaannya Tahun 2020 dapat dilihat pada tebel dibawah ini.

Tabel 2.2.8 Data Luas Tanam dan Panen tanaman Pangan Dikabupaten Sintang 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Luas Tanam (ha)**					
	1. Padi	31.937	36.952	41.612	45.804	37.020
	2. Jagung		2.626	4.087	3.751	1.441
	Luas Panen (ha)					
2	1. Padi	35.335	35.865	40.079	39498	44.364
3	2. Jagung	1.256	1.036	1.884	1.723	2.925

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2020

NO	Hasil Pertanian	Hasil Produksi Sektor Pertanian (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cabai	-	264	417	851	788,7
2	Kangkung	-	223	199	346	511,3
3	Ketimun	-	424	422	873	1234,4
4	Cabai Besar	-	103	126	106	138,6
5	Bayam	-	228	183	279	425,9
6	Bawang Daun	-	8	12	11	49,2
7	Kembang kol	-	-	-	-	-
8	Bawang Merah	-	0,2	-	1	2,5
9	Bawang putih	-	-	-	-	-
10	Buncis	-	72	57	105	169,6

4) Sumber daya Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan yang tertinggi di Kabupaten Sintang pada Tahun 2020 adalah tanaman kelapa sawit yaitu seluas 323.703,89 ton, selanjutnya tanaman karet seluas 39.269,00 ton, lada 878,20 ton, kelapa hibrida 208,50 ton, kelapa dalam 136,50 ton, kopi 83,07 ton, pinang 38,00 ton, aren 27,00 ton, kakao 8,00 ton, kapok/randu 4,91 ton.

Komoditas perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Sintang sebanyak 10 jenis tanaman, 2 diantaranya merupakan komoditas unggulan yaitu : Kelapa Sawit dan Karet. Produksi dan produktivitas komoditas perkebunan Rakyat Tahun 2020 di Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam tabel 2.16.

Tabel 2.2.9 Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat Tahun 2020

No	Jenis Komoditas Tanaman	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Karet	38.879,85	39.609,00	39.274	39.269	39.920,00
2	Kelapa Dalam	143,90	143,90	144	144	136,50
3	Kelapa Hibrida	210,85	205,00	211	211	208,50
4	Kelapa Sawit	260.291,00	291.860,00	280.771	282.569	316.606,15
5	Lada	404,80	901,30	901	901	1.157,70
6	Kopi	96,60	99,00	95	99	83,07
7	Kakao	8,30	10,00	10	10	8,00
8	Kapok/Randu	5,30	5,30	5	5	4,91
9	Aren	34,50	32,00	32	32	27,00
10	Pinang	51,70	75,00	75	75	38,00
Jumlah		**300,127**	**332.940,5**	**321,518**	**323.315**	**358.189,83**

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 2020

Upaya pengembangan komoditas unggulan perkebunan rakyat di Kabupaten Sintang telah di laksanakan untuk beberapa komoditas unggulan diataranya Kelapa Sawit dan Karet.

Kelapa Sawit dan karet merupakan komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai kesesuaian tumbuh yang cukup baik di Kabupaten Sintang, sebaran

luas tanaman kelapa sawit dan karet cukup merata hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Sintang.

Selain kelapa sawit dan karet Komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai potensi pengembangan yang cukup baik adalah Lada, kelapa hibrida, kelapa dalam, dan kemudian di susul kopi, pinang, aren, kakao, terakhir kapok/randu.

Wilayah potensial untuk pengembangan areal perkebunan tersebar hampir di seluruhkecamatan di Kabupaten Sintang. Untuk mengoptimalkan lahan perkebunan serta upaya peningkatan produksi perkebunan diperlukan intervensi berupa pembangunan yang dapat menarik aktivitas kegiatan perkebunan. Selain itu, di wilayah Kabupaten Sintang diperlukan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan perkebunan seperti jaringan jalan antara lain jalan produksi perkebunan.

5) Sumber daya Peternakan

Populasi ternak unggas yang tertinggi di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 adalah ayam ras/broiler yaitu sebanyak 2.640.368 ekor, selanjutnya ayam buras/kampung yaitu sebanyak 475.565 ekor, dan itik sebanyak 6.239 ekor.

Tabel 2.2.10

Data populasi unggas dan jenis unggas di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020

NO	Populasi Jenis Unggas	Populasi unggas dan jenis Unggas				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ayam ras/boiler	3.086.390	2.801.082	2.885.484	2.835.307	2.640.368
2	Ayam buras/kampung	478.674	491.245	490.218	490.218	462.315
3	Ayam petelur	-	4.200	5.500	17.800	13.250
4	Itik	3.583	3.447	3.447	3.474	3.994
5	Itik Manila	-	2.758	2.779	3.507	2.245

Data populasi ternak tertinggi di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 adalah babi yaitu sebanyak 67.505 ekor,selanjutnya sapi potong yaitu sebanyak 6.756 ekor, kambing sebanyak 3.363 ekor, dan kerbau sebanyak 96 ekor, domba 33 ekor.

Tabel 2.2.11
Populasi dan jenis Ternak di Kabupaten Sintang

NO	Jenis komoditas peternakan	Populasi dan jenis ternak				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi potong	7.472	7.676	6.667	6.667	6.756
2	Kerbau	162	186	186	186	96
3	Kambing	3.184	3.279	3.306	3.306	3.363
4	Babi	84.919	88.498	86.280	75.500	67.505
5	Domba	-	60	50	39	33

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan dan/atau indikator lainnya seperti MDG' atau indikator yang telah diratifikasi dapat dilihat pada *Tabel 2.1 dan Tabel 2.2*

Berdasarkan data pada *Tabel. 2.1* diketahui bahwa untuk komoditas Padi, kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam meningkatkan produksi padi dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi yaitu peningkatan produktivitas melalui kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman padi dan palawija, petani dapat belajar langsung di lapangan dalam menerapkan berbagai teknologi usahatani melalui penggunaan input produksi yang efisien menurut spesifik lokasi sehingga mampu menghasilkan produktivitas padi tinggi untuk menunjang peningkatan produktivitas dan pendapatan petani secara berkelanjutan. Melalui kegiatan Pengembangan

Intensifikasi Tanaman padi dan palawija petani akan mampu mengelola sumberdaya yang tersedia (benih, tanah, air dan sarana produksi lainnya) secara terpadu dalam melakukan budidaya di tanah usahataninya berdasarkan kondisi spesifik lokasi sehingga petani menjadi lebih trampil serta mampu mengembangkan usahataninya dalam rangka pencapaian sasaran produksi yang ditetapkan. Disamping itu, peningkatan produksi maupun produktivitas juga didukung oleh pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas alat mesin pertanian pra-panen, panen dan pasca panen.

Sedangkan untuk komoditas palawija, dapat kita lihat bahwa produksi tanaman pangan selama 2 tahun berturut-turut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena berkurangnya luas tanam komoditas palawija dikarenakan para petani lebih memilih menanami sawahnya dengan padi dibandingkan oleh palawija. Selain itu kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi juga mempengaruhi keinginan petani untuk menanam tanaman palawija.

Untuk komoditas hortikultura kondisi capaiannya lebih baik dari komoditas tanaman palawija. Hal ini disebabkan selain meningkatnya pengetahuan petani tentang cara pengolahan komoditas hortikultura, pendapatan yang menjanjikan dari usaha tani komoditas hortikultura pun lebih menggoda para petani untuk berusahatani di bidang hortikultura dibandingkan berusaha tani komoditas palawija.

Berdasarkan data pada Tabel 2.2, diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran selama dua tahun kebelakang menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi penyerapan anggaran rata-rata diatas 90%. Penajaman prioritas dan fokus kegiatan program yang dilandasi oleh analisis keadaan, analisis potensi sumberdaya yang akurat, sinergitas program antar dinas / instansi terkait pada setiap tingkatan mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat lapangan, serta sejalan dengan tuntutan kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional merupakan faktor-faktor pendukung dalam pencapaian realisasi anggarantersebut.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

1) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

a) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan.

b) Peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

c) Produktivitas tanaman pertanian dan perkebunan masih rendah di beberapa wilayah.

d) Kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi.

e) Jumlah Sumber Daya aparatur sangat terbatas

f) Data perkebunan Belum semua tersedia secara akurat serta upaya perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan pertanian dan perkebunan yang belum optimal

g) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan masih rendah.

h) Peningkatan kualitas SDM dan kaderisasi berjalan lambat

i) Sarana-prasana pendukung kerja terbatas

j) Banyaknya areal pertanian dan perkebunan yang terlantar dan kurang produktif

k) Adanya ancaman serangan hama dan penyakit, perubahan iklim global (*climatechange*)

l) Terbatasnya akses pelaku usaha terhadap sumber permodalan;

m) Terbatasnya akses pelaku usaha terhadap informasi pasar;

n) Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan instansi terkait dan para pemangkukepentingan belum secara utuh dan menyeluruh.

2) Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan Dinas Pertanian dan Perkebunan, meliputi :

a) Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 merupakan Undang-undang tentang pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

b) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

c) Adanya Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

d) Kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan daerah yang berpihak padapengembangan ekonomi kerakyatan

e) Adanya peluang pasar yang cukup terbuka terutama terhadap produk-produk unggulan pertanian dan perkebunan.

f) Banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan serta Potensi hasil yang cukup besar.

g) Kebutuhan masyarakat terhadap hasil pertanian dan perkebunan cukup tinggi

h) Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam pembangunan pertanian

danperkebunan.

i) Tersedia stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan pertanian danperkebunan

j) Adanya dukungan SDA dengan agroklimat yang sesuai untuk pengembangan usahapertanian dan perkebunan secara terpadu

k) Terbentuknya Kelompok tani sektor pertanian dan perkebunan.

l) Inovasi dan introduksi teknologi pertanian dan perkebunan

m) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pertanian dan perkebunan

n) Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian

o) Optimalisasi Sistem Perbenihan dan Perbibitan

p) Dukungan Anggaran yang memadai

q) Kebijakan Pembangunan pertanian dan perkebunan yang tepat manfaat dan sasaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Sintang selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1:

Tabel T-B.3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
.	**Rendahnya Produktivitas Hasil pertanian dan Perkebunan**	1.1 Infrastruktur pertanian dan perkebunan yang kurang memadai	1.1.1 Banyak terjadi kerusakan pada jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani
			1.1.2 Jalan Usaha Tani Kurang Memadai
			1.1.3 Kondisi Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Rumah Potong Hewan yang sudah tidak layak untuk dipergunakan
		1.2 Terbatasnya sarana alsintan penunjang produksi pertanian dan perkebunan	1.2.1 Tidak terjangkau nya Harga Alsintan

		1.3 Terbatasnya produksi Benih dan bibit yang Berkualitas	1.3.1 Jumlah Penghasil Benih bersertifikat yang terbatas
		1.4 Rendahnya efektifitas dan efisiensi proses panen, penanganan pasca panen dan pemasaran	1.4.1 Tingginya tingkat kehilangan hasil dan rendahnya Mutu Hasil Produksi Pertanian
			1.4.2 Posisi Tawar Petani Lemah
		1.5 Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pertanian	1.5.1 Rendahnya Pengetahuan Sikap dan Keterampilan Petani
			1.5.2 Kelas Kelompok Pertanian Penyuluh masih didominasi Kelompok Pemula dan Gernerasi Tua
		1.6 Rendahnya pengembangan sentra kawasan komoditas unggulan dan komoditas potensial pertanian dan perkebunan	1.6.1 Rendahnya Kerjasama antar kelompok tani

	Pergeseran Tata guna lahan dan lapangan usaha petani dari petani tanaman pangan ke petani perkebunan sawit dan karet	1.1 Berkurangnya lahan sawah karena alih fungsi lahan ke perkebunan sawit dan karet	1.1.1 Harga komoditas perkebunan (sawit) cenderung meningkat
	Produktivitas pertanian masih rendah	1.1 Produktivitas pertanian masih rendah	1.1.1 Pola tanam monokultur yang terus menerus 1.1.2 Kesuburan tanah rendah
	Rendahnya tingkat Produktifitas Tanaman Perkebunan	1.1 Tingkat Produktifitas Tanaman Karet di Kabupaten Sintang hanya 658,92 Kg/Ha atau sekitar 56,9 % dari produktifitas nasional (1:158 Kg/Ha)	1.1.1 Karet : - Harga yang tidak kunjung membaik menyebabkan kurangnya perawatan kebun. - Penyakit Gugur daun *Pestaloptiopsis sp* dan Jamur Akar Putih. - Tidak diterapkannya Good Agricultural Practices (GAP) dalam Pengelolaan Kebun. - Kualitas Produk Lateks (Lump/Slab) yang rendah
		1.2 Tingkat Produktifitas Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang 2.011,81 Kg/Ha atau 50,2 % dari Nasional (4.006	1.2.1 Kelapa Sawit : - Penggunaan benih yang tidak legitimate (benih asalan) - Kurangnya penerapan Good Agricultural Practice (GAP) dalam Pengelolaan Kebun. - Input sarana Produksi berupa pupuk

		Kg/Ha)	yang rendah. - Jalan Produksi yang belum memadai
	Belum maksimalnya pembinaan terhadap pengembangan usaha perkebunan	1.1 Besarnya jumlah investasi pada sub sector perkebunan kelapa sawit	1.1.1 Terbatasnya unsur penunjang di Bidang Pengembangan Perkebunan
	Belum optimalnya pelaksanaan penetapan Indeks K	1.1 Rendahnya kuantitas dan kontinuitas peserta penetapan Indeks K	1.1.1 Rendahnya Kesadaran PMKS hadir dalam penetapan indeks K
	Belum optimalnya pemanfaatan kelembagaan petani	1.1 Kurangnya peran kemitraan kelembagaan petani pekebun dalam mewujudkan kesejahteraan petani	1.1.1 Relatif masih rendahnya pengetahuan pnegurus koperasi/petani dalam penerapan hubungan kemitraan kelembagaan petani pekebun dengan perusahaan
	Produktivitas tanaman perkebunan rakyat yang masih rendah	1.1 Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya tanaman perkebunan	1.1.1 Kurang tersedianya Sarana Budidaya Tanaman Perkebunan seperti kurangnya Bibit Unggul Bersertifikat, kurangnya pupuk dan kurangnya pestisida, serta kurang teresedianya prasarana perkebunan seperti jalan produksi, alat, mesin dan pengairan.

		Banyaknya tanaman perkebunan yang terserang hama dan penyakit	Kurangnya kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) bagi para petani perkebunan.
	Kemandirian kelambagaan petani dalam usaha tani yang masih rendah	1.2 Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa	1.2.1 Kurang terfasilitasinya kelembagaan petani dikarenakan jumlah penyuluh sangat terbatas, sarana dan prasarana kelembagaan penyuluh yang kurang serta pembiayaan operasional kelembagaan sangat minim serta perlunya peningkatan kompetensi penyuluh dan petani

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintan Tahun 2021-2026, dimana pada RPJMD tersebut telah ditetapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai berikut:

Visi Kabupaten Sintang : ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Rukun, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026."***

Misi 1 : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.

Misi 2 : Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adildan terjangkau bagi masyarakat.

Misi 3 : Menoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari.

Misi 4 : Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.

Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi 6 : Menata dan mengembangkan Manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari penjabaran visi dan misi tersebut di atas peran Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah mendukung dan menyukseskan terutama misi ke-5. Dukungan untuk menyukseskan misi ke-5 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada urusan pertanian.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Rukun, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Tahun 2022				
NO	MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
	Misi 5 :			
1.	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	Infrastruktur pertanian dan perkebunan yang kurang memadai	Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian	Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur
		Terbatasnya sarana alsintan penunjang produksi pertanian dan perkebunan		
		Terbatasnya produksi Benih dan bibit yang Berkualitas	Kurang sadarnya petani terhadap pentingnya penggunaan benih berkualitas	Dukungan dari pemerintah dan non pemerintah untuk membeli benih yang dihasilkan oleh petani penangkar Benih
		Rendahnya efektifitas dan efisiensi proses	Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran	Adanya kerjasama dengan investor
		panen, penanganan pasca panen dan pemasaran	Sifat komoditas pertanian yang mudah Rusak	dan kemitraan serta promosi produk pertanian
		Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pertanian an Perkebunan	Keterbatasan SDM petugas baik kuantitatif maupun kualitas	Dukungan organisasi/ kelembagaan non pemerintah (LSM/HKTI/KTN A/ Asosiasi/ Koperasi Tani/Gapoktan/Kel Tani/ P3A/GP3A)

		Rendahnya pengembangan sentra kawasan komoditas unggulan dan komoditas potensial pertanian dan perkebunan	Rendahnya Kerjasama antar kelompok tani	Adanya Dukungan pemerintah dalam hal Pengembangan Agrobisnis terpadu
1	2	3	4	5
	Misi 6 :			
2.	Menata dan mengembangkan Manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Kurangnya ASN	Keterbatasan Penerimaan ASN di ruang lingkup Sekretariat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	Dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menambah Tenaga ASN di Sekretariat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
		Kurangnya SDM ASN di ruang lingkup Sekretariat	Keterbatasan Pelatihan ASN terkait bidang TuPokSI	Dukungan dari pemerintah Daerah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan terkait TuPokSi

3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang Tahun 2014-2034 merupakan dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang.

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Sintang yang terkait dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang diantaranya : Kebijakan Peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan dengan strategi mengembangkan dan meningkatkan kawasan pusat pengembangan agropolitan, mengembangkan kawasan minapolitan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian

Arahan pemanfaatan ruang wilayah ruang Kabupaten Sintang ditujukan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang kabupaten serta kawasan strategis kabupaten. Arahan pemanfaatan ruang diprioritaskan untuk mendukung perwujudan struktur tata ruang (yang meliputi pusat kegiatan dan sistem prasarana yang mengikatnya), perwujudan pola ruang, serta perwujudan kawasan strategis kabupaten dan kawasan lain di luar kawasan strategis kabupaten yang hendak dituju dalam kurun waktu yang sama dengan jangka waktu perencanaan yang dijabarkan secara bertahap dalam waktu 5 tahunan. Arahan pemanfaatan ini mencakup progam-program utama untuk perwujudan rencana struktur dan pola ruang yang hendak dituju sampai akhir tahun perencanaan.

Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten dilaksanakan dengan beberapa rencana program. Rencana Program yang berhubungan langsung dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan antara lain adalah Program Perwujudan Kawasan Budidaya, antara lain :

1) Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertanian
   Perwujudan program pengembangan kawasan pertanian, yaitu :
   a. Pengembangan kawasan pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Sintang
   b. Peningkatan produktivitas lahan padi sawah di Kabupaten Sintang.
   c. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian Tanaman pangan
   d. Pengembangan pengelolaan kegiatan pertanian Tanaman Pangan yang lebih terorganisir
   e. Pengembangan dan perluasan kawasan hortikultura
   f. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan holtikultura
   g. Pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan holtikultura yang lebih terorganisir
   h. Intensifikasi lahan kawasan perkebunan
   i. Pengembangan komoditi unggulan perkebunan kelapa Sawit, Karet, Lada, Kopi, Kakao.
   j. Pengembangan sarana, prasarana dan sumber daya pendukung kegiatan perkebunan

k. Pengembangan pusat pakan ternak

l. Optimalisai budidaya peternakan

m. Penetapan dan pengembangan LP2B

n. Penetapan kawasan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan

2) Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Perkebunan

Perwujudan program pengembangan kawasan perkebunan, yaitu :

a. Intensifikasi lahan kawasan perkebunan

b. Pengembangan komoditi unggulan perkebunan kelapa sawit, karet, kemiri, kelapa, coklat, aren

c. Pengembangan sarana, prasarana dan sumber daya pendukung kegiatan perkebunan

d. Perluasan wilayah pemasaran produksi perkebunan, baik lokal maupun pasar ekspor.

e. Penggalakan program penggunaan bibit unggul yang mendukung perkembangan perkebunan.

f. Pemberian penguatan modal bagi petani perkebunan dalam rangka menunjang kesinambungan usaha perkebunan.

g. Pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi (basis komoditas) perkebunan dan pengembangan pusat

pengumpul dan distribusi bagi pertanian perkebunan dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau).

h. Menjaga stabilitas harga pupuk, obat-obatan, dan bibit tanaman perkebunan.

Pemanfaatan ruang kawasan pertanian dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut :

a. Tetap terjaganya kualitas lingkungan.

b. Terciptanya pertumbuhan perekonomian wilayah yang berbasiskan perekonomian lokal.

c. Pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian agar dapat mencapai optimal.

Pola ruang kawasan tanaman pangan di Kabupaten Sintang diarahkan untuk dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan dengan luas sebesar 2.163.500 Ha lahan pertanian. Pemanfaatan ruang kawasan pertanian ini meliputi kawasan peruntukan pertanian pangan lahan basah, kawasan peruntukan pertanian pangan lahan kering dan kawasan.

Sedangkan luas kawasan perkebunan di Kabupaten Sintang adalah 296.924,31 Ha. Dimana Areal perkebunan di Kabupaten Sintang tersebut meliputi perkebunan rakyat (PR), perkebunan besar swasta (PBS), dan perkebunan besar negara (PTPN VIII). Bentuk pengusahaan perkebunan adalah Perkebunan Besar Negara (PTPN), Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dominan adalah Perkebunan Rakyat.

Adapun terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dokumen pendukung RTRW berguna untuk :

1. Menjamin keberlangsungan lingkungan hidup strategis dalam kawasan di Kabupaten Sintang dan secara umum mendukung keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.
2. Menjamin bahwa RPJMD Kabupaten Sintang 2021-2026 sudah memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspirasi *stakeholder.*

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang meliputi analisis Renstra Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang, dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang sebagai berikut :

a. Sintang sebagai lumbung pangan Nasional/Regional

b. Produktivitas Subsektor Pertanian dan Perkebunan masih rendah

c. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

d. Bencana kekeringan dan kebanjiran yang disebabkan adanya perubahan iklim yang ekstrim.
e. Kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi.
f. Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertanian dan perkebunan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung visi "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026.***"

SINTANG Menjadi Destinasi Wisata Unggulan Nasional berbasis Potensi Lokal", yang dijabarkan dalam misi kedua yaitu "Meningkatkan Produktivitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata" maka tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya Produktivitas Subsektor Pertanian dan Perkebunan.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka tujuan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan pada Tahun 2026.

1) Tercapainya produktivitas komoditas subsektor Pertanian (ton)
2) Tercapainya produktivitas komoditas subsektor Perkebunan (ton)

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 2021-2026, terfokus pada upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid19. Adapun strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Strategi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Tanaman Pangan dan Hortikultura** adalah Strategi Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan melalui peningkatan luas tanam dan luas panen pengembangan komoditas potensial serta unggulan komoditas pertanian/perkebunan.
2. **Strategi Peternakan**
   a) Meningkatkan jumlah BPP dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kecamatan
   b) Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa melalui operasional BPP dan penyuluh.
   c) Penguatan kapasitas BPP di kecamatan dan Posluhdes di desa.
   d) Melatih petani untuk menjadi penangkar dalam Menyediakan benih Unggul bersertifikat
   e) Pengadaan Pupuk dan Pestisida untuk membantu petani meningkatkan produktivitas tanaman
   f) Mengoptimalkan kinerja PUSKESWAN
   g) Menambah petugas cek point di perbatasan
   h) Pembangunan sarana dan prasarana rumah potong unggas
   i) Memahamkan penanganan daging dari peternak sampai ke meja makan (from farm to the table)
   j) Membangun sarana dan prasarana rumah potong ungags
   k) Menambah sarana dan prasarana RPH / RPU
   l) Memenuhi kebutuhan bibit / benih yang berkualitas
3. **Strategi Sarana Prasarana Perkebunan**
   a) Melatih petani untuk menjadi penangkar dalam menyediakan benih unggul bersertifikat.
   b) Pengadaan pupuk dan pestisida untuk membantu petani meningkatkan produktifitas tanaman.
4. **Strategi Pengembangan Perkebunan**
   a) Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan melalui Penerangan GAP
   b) Meningkatkan Kapasitas Olah TBS melalui Peningkatan Kapasitas dan Jumlah PKS

c) Meningkatkan Proyeksi Pengembangan SDM karet, kelapa sawit, lada, Kopi dan Kakao Rakyat

d) Peningkatan Produktivitas lahan melalui integrase ternak dan tanaman pangan

5. **Strategi Penyuluhan Pertanian**

a) Memfasilitasi pengembangan kelompo tani dan Gapoktan untuk mandiri

b) Meningkatkan jumlah pelatihan teknis dan non teknis bagi penyuluh pertanian PNS, PPPK dan penyuluh swadaya ditingkat kabupaten dan kecamatan

c) Meningkatkan jumlah BPP dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kecamatan

d) Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa melalui operasional BPP dan penyuluh

e) Penguatan kapasitas BPP di kecamatan dan Posluhdes di desa.

6. **Strategi Pemberdayaan Urusan Penunjang Pemerintahan** adalah Strategi Pemberdayaan Urusan Penunjang Pemerintahan dimaksudkan untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Penyuluhan, Pengembangan Perkebunan, dan Sarana Prasarana Perkebunan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan disusun mengacu pada Program yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021- 2026, dengan uraian sebagai berikut:

Urusan Pertanian

Strategi : 1) Meningkatkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan melalui peningkatan luas tanam dan pengembangan komoditas potensial serta unggulan komoditas pertanian/perkebunan

2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan yang memadai

Kebijakan : 1) Pemantapan Program Intesifikasi dan Penerapan teknologi budidaya tepat guna

2) fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan sesuai potensi

Program : Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Penjabaran Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penilaian dan Pembinaan Usaha Perkebunan
2) Kegiatan Pengembangan Intensifikasi padi, palawija
3) Kegiatan Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan
4) Kegiatan Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (DAK)
5) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan
6) Kegiatan Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis.

Strategi : Meningkatkan Kualitas pengelolaan hasil produksi pertanian melalui penerapan teknologi panen dan pasca panen

Kebijakan : Pengembangan penanganan panen dan pasca panen sesuai kebutuhan

Program : Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian.

Penjabaran Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen
2) Kegiatan Peningkatan Mutu Hasil Produksi Pertanian
3) Kegiatan Peningkatan Mutu Hasil Produksi Pertanian (upland Area)
4) Kegiatan Informasi dan Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah

Strategi : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian melalui peningkatan pendampingan dan pengawalan teknologi

Kebijakan : Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian (Petugas dan Masyarakat Petani)

Program : Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian

Penjabaran Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
2) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Petani Pertanian / Perkebunan
3) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian.
4) Uraian :

Program dan Kegiatan serta pendanaan selengkapnya disajikan pada Tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD Kabupaten Sintang 2021 – 2026 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan meliputi :

1. Indikator Kinerja OPD
2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang sudah menyesuaikan dengan Aspek dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) menurut Bidang Urusan Pilihan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mencakup :

- Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB
- Cakupan Bina Kelompok Tani
- Produksi Sektor Pertanian
- Produksi Sektor Perkebunan
- Produktivitas Padi atau bahan Pangan utama lokal lainnya perhektar.

Adapun Perumusan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 secara terperinci disajikan pada **Tabel 7.1**

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjabarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan pertanian dan Perkebunan yang lebih terukur dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang mendukung terhadap Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 perlu didukung oleh :

1) Komitmen Kepala Daerah yang kuat dan demokratis;
2) Komitmen Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang beserta jajarannya yang kuat dan demokratis;
3) Konsistensi kebijakan pemerintah;
4) Keberpihakan pada masyarakat, sektor swasta dan dunia usaha;
5) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Semoga Pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Sintang dapat terus ditingkatkan walaupun masih banyak hambatan dan masalah yang dihadapi dalam Pembangunan Pertanian, tetapi dengan memanfaatkan peluang yang ada dan memperbaiki kelemahan-kelemahan untuk di jadikan dan diarahkan menjadi kekuatan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Sintang.

Sintang, Juli 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SINTANG

Ir. Elisa Gultom, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661103 199503 1 003

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SINTANG

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	**Bidang Tanaman Pangan**																		
1.a	Meningkatkan Produksi Padi	167.400 ton	Tercapainya Peningkatan Produksi Padi (Ton)	-	157,000	172,000	160,000	170,000	178,000	94,445	85,317	93,682	97,526	74,398	60.1561	49.60	58.55	57.37	41.80
1.b	Meningkatkan Produksi Palawija	28.600 ton	Tercapainya Peningkatan Produksi Palawija (Ton)	-	25,000	25,000	28,000	30,000	35,000	18,167	29,871	30,263	32,008	28,161	72.67	119.48	108.08	106.69	80.46
1.c	Meningkatkan Produktivitas Padi	30 kw/ha	Tercapainya produktivitas padi Kw/Ha	-	26	28	30	32	35	25.83	28.61	26.69	27.16	24.99	99.35	102.18	88.97	84.88	71.4
1.d	Meningkatkan Produksi Palawija	30 kw/ha	Tercapainya produktivitas palawija Kw/Ha	-	26	28	30	32	35	23.38	29.96	29.26	30.89	29.61	89.92	107.00	97.53	96.53	84.6
1.e	Penyediaan sarana prasana pertanian																		
	- Jalan Usaha Tani	250 km	Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani		50	50	50	50	50	85	136	142	175	194	170.00	272.00	284.00	350.00	388.00
	- Jaringan irigasi	2.400 ha	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi		200	250	350	400	450	560	640	1,155	1,340	1,661	280	256	330	335	396.11
	- Sarana Pengairan/TAM	100 ha	Terlaksananya Pembangunan Sarana Pengairan		20	20	20	20	20	15	20	25	36	39	75	100	125	180	195.00
	- Alat Mesin Pertanian	25 unit	Terlaksananya Pengadaan Alsintan		5	5	5	5	5	0	0	0	50	0	0	0	0	1000	0.00
	- Lahan Pertanian	1.000 ha	Terlaksananya Pembangunan Lahan Baru		200	200	200	200	200	800	503	605	143	29	400	251.5	302.5	71.5	14.50
2.	**Bidang Peternakan**																		
2.a	Potong Hewan																		
	RPH Unggas		Terlaksananya Pembangunan RPH Unggas		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00	0	0
	RPH Babi		Terlaksananya Pembangunan RPH Babi		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RPH Ruminansia		Terlaksananya Pembangunan RPH Ruminansia		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Peralatan RPH		Terlaksananya Pengadaan peralatan RPH Unggas/Babi/Ruminansia		0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00	0
	Kios Daging		Terlaksananya Pembangunan Kios Daging		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.b	Meningkatkan Produksi Peternakan		Tercapainya Produksi Peternakan (Ton/Thn)		3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	3,058	3,259	3,539	3,972	3,728	101.93	93.11	88.48	88.27	74.56
2.c	Meningkatkan Kesehatan Ternak dan pencegahan penyakit ternak		Terlaksananya pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak (ekor)		500	500	600	600	750	400	450	525	580	620	80.00	90.00	87.50	96.67	82.67
3.	**Bidang Perkebunan**																		
3.1	Meningkatkan Produksi Perkebunan (Komodity)		Tercapainya Produksi (Ton/Thn)																
3.2	Komodity Karet (Ton)	50,000	Tercapainya Produksi Karet 50.000 Ton/Tahun		40,000	40,000	45,000	49,000	50,000	351,091.39	37,867.75	37,449.50	46,245.3	47,129.36	94.67	94.67	83.22	92.49	94.26
3.3	Komodity Kelapa Sawit (Ton)	200,000	Tercapainya Produksi Kelapa Sawit 200.000 Ton/Thn		150,000	150,000	175,000	190,000	200,000	521,031.70	594,614.11	739,119.92	193,226.22	193,226.22	347.35	396.41	422.35	96.61	96.61
3.4	Komodity Lada (Ton)	600	Tercapainya Produksi Lada 600 Ton/Tahun		400	400	500	590	600	707.14	756.21	505.70	506.86	506.86	176.79	189.05	101.37	84.48	84.48
4.	**Bidang Penyuluhan**																		
	- Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Petani		Kelas Kelompok Tani																
	- Meningkatnya Kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian		Diklat / Pelatihan Penyuluh																
	- Mantapnya sistem penyuluhan pertanian dalam meningkatkan kemampuan petani, kemadirian petani		Pendampingan Pelaksanaan Sistem Kerja Lakususi (Kecamatan)				14	14	14			14	14	7			100	100	50

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sintang

Uraian (Urusan , Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - rata Pertumbuhan		Keterangan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,660,783,815	15,289,119,200	14,159,170,584	14,860,381,315.48	15,108,281,035	11,566,012,693	14,019,376,305	13,406,147,819	13,424,721,381.00		99%	92%	95%	90%	0%	14,215,547,190	13,104,064,550	Permendagri No 050
3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,000,000	7,000,000	7,000,000	9,500,000	6,865,000		7,000,000	7,000,000	9,500,000		0%	100%	100%	100%	0%	7,473,000	5,875,000	Permendagri No 050
3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
3.27.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60,000,000	60,000,000	35,000,000.00	70,220,000	26,181,000	57,000,000	48,891,000	34,500,000.00	69,970,000		95%	81%	99%	100%	0%	50,280,200	52,590,250	Permendagri No 050
3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,000,000	4,000,000	4,000,000	8,200,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	3,970,000	8,200,000		100%	100%	99%	100%	0%	5,040,000	5,042,500	Permendagri No 050
3.27.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,000,000	5,000,000	5,000,000	8,200,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,578,600	8,200,000		100%	100%	92%	100%	0%	5,640,000	5,694,650	Permendagri No 050
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																-	-	
3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,499,750	2,499,750	72,499,750.00	3,500,000.00	3,498,000	2,499,750	2,499,750	72,484,750.00	3,500,000.00		100%	100%	100%	100%	0%	16,899,450	20,246,063	Permendagri No 050
3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22,599,990	22,599,990	22,815,000.00	18,251,720.00	13,428,900	18,999,990	15,782,190	21,604,890.00	18,235,550.00		84%	70%	95%	100%	0%	19,939,120	18,655,655	Permendagri No 050
3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	596,055,000	596,055,000	743,675,000	456,220,000	251,636,000	595,307,013	593,608,034	742,980,374	453,754,136		100%	100%	100%	99%	0%	528,728,200	596,412,389	Permendagri No 050
3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,697,600	8,697,600	8,697,600.00	4,874,400.00	5,650,000	6,840,000	6,840,000	8,620,000.00	4,850,006.00		79%	79%	99%	99%	0%	7,323,440	6,787,502	Permendagri No 050
3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141,179,695	141,179,695	127,290,694	31,846,149	22,942,774	141,164,615	141,294,919	126,406,347	31,575,955		100%	100%	99%	99%	0%	92,887,801	110,110,459	Permendagri No 050
3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300,650,000	440,650,000	313,780,000	426,230,000	5,416,611	300,298,000	308,675,800	252,456,000	416,120,000		100%	70%	80%	98%	0%	297,345,322	319,387,450	Permendagri No 050
3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15,000,000	15,000,000	15,000,000.00	12,000,000.00	45,193,000		14,000,310	9,166,700.00	11,679,200.00		0%	93%	61%	97%	0%	20,438,600	8,711,553	Permendagri No 050
3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,200,000	3,200,000	3,200,000.00	4,457,500.00	4,341,000	2,740,000	2,740,000	1,662,500.00	4,037,500.00		86%	86%	52%	91%	0%	3,679,700	2,795,000	Permendagri No 050
3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	359,118,600	389,118,600	505,367,570	598,409,800	570,796,800	250,674,590	270,866,590	453,675,880	537,340,670		70%	70%	90%	90%	0%	484,562,274	378,139,433	Permendagri No 050
3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,660,000	45,660,000	65,182,440.00	61,521,828.00	132,000,000	38,540,418	38,540,418	56,561,698.00	60,194,115.00		84%	84%	87%	98%	0%	70,004,854	48,459,162	Permendagri No 050
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																		**Permendagri No 050**
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian																		
3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4,514,268,924	5,954,568,900	5,000,000,000	2,000,000,000	4,296,065,000		4,981,050,754	4,999,304,908	2,000,000,000		0%	84%	100%	100%	0%	4,352,980,565	2,995,088,916	Permendagri No 050
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4,600,268,800	4,714,268,000	980,306,320	766,888,540	532,096,000		1,651,496,682	933,048,093	483,051,990		0%	35%	95%	63%	0%	2,318,765,532	766,899,191	Permendagri No 050
3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4,600,000,000	5,920,147,586	5,000,000,000	2,721,969,500	2,590,961,850		4,392,372,895	4,998,400,120	2,335,217,371		0%	74%	100%	86%	0%	4,166,615,787	2,931,497,597	Permendagri No 050
3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	4,462,107,724	3,553,504,056	2,288,870,000	1,000,000,000	72,000,000	3,845,311,916	536,894,000	2,234,008,570	1,000,000,000		86%	15%	98%	100%	0%	2,275,296,356	1,904,053,622	Permendagri No 050
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																		**Permendagri No 050**
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																		
3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1,557,481,000	1,857,481,000	882,624,845	2,685,000.00	4,005,183,500		1,263,278,900	723,665,147	2,685,000.00		0%	68%	82%	100%	0%	1,661,091,069	497,407,262	Permendagri No 050
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1,570,797,594	1,730,797,594	1,612,877,150	1,623,148,915	524,646,500	1,280,533,251	1,490,783,671	1,582,233,242	250,116,059		82%	86%	98%	15%	0%	1,412,453,551	1,150,916,556	Permendagri No 050
3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	58,059,000	100,000,000	225,000,000.00	249,755,000	-	29,943,000	66,754,713	149,190,000.00	248,215,000		52%	67%	66%	99%		126,562,800	123,525,678	Permendagri No 050
3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	700,000,000	950,000,000	1,450,000,000.00	1,126,180,000	2,179,799,977	598,530,000	610,897,600	492,281,983	946,240,500		86%	64%	34%	84%	0%	1,281,195,995	661,987,521	Permendagri No 050
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN																		**Permendagri No 050**
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																		
3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			254,999,880.00	22,554,850.00	53,113,000			254,968,886.00	21,239,850.00				100%	94%	0%	66,133,546	69,052,184	Permendagri No 050
3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			912,287,500.00		1,000,000,000			871,188,918.00					95%		0%	382,457,500	217,797,230	Permendagri No 050
3.27.05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			857,721,150.00		319,458,700			809,345,344.00					94%		0%	235,435,970	202,336,336	Permendagri No 050
3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				300,000,000.00	328,640,300				0.00					0%	0%	125,728,060		Permendagri No 050
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																		**Permendagri No 050**
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			850,995,616					371,079,663					44%			170,199,123	92,769,916	Permendagri No 050
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	374,488,400	374,488,400	178,885,000.00	156,951,000.00	29,996,000	370,110,400	367,200,112	169,695,000.00	155,811,000.00		99%	98%	95%	99%	0%	222,961,760	265,704,128	Permendagri No 050
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																-	-	**Permendagri No 050**
3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	378,707,800	378,707,800	600,000,000	314,188,450	112,440,000		343,800,600	568,000,000	308,819,350		0%	91%	95%	98%	0%	356,808,810	305,154,988	Permendagri No 050

Urusan (Urusan , Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - rata Pertumbuhan		Keterangan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	426,601,700	426,601,700	1,495,538,310	543,908,510	91,135,800	425,139,850	405,785,000	1,422,317,025	542,399,904		100%	95%	95%	100%	0%	596,757,204	698,910,445	Permendagri No 050
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	296,367,523	296,367,523	566,919,850	250,650,350	67,345,000		123,456,325	555,815,229	247,733,387		0%	42%	98%	99%	0%	295,530,049	231,751,235	Permendagri No 050
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN																		**Permendagri No 050**
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		Permendagri No 050
3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	51,500,000	55,500,000	50,000,000.00		16,895,000		47,670,000	33,795,000.00			0%	86%	68%		0%	34,779,000	20,366,250	Permendagri No 050
3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	90,225,804	90,225,804	72,500,000.00	35,410,000.00	8,235,300		80,356,032	69,204,800.00	35,245,000.00		0%	89%	95%	100%	0%	59,319,382	46,201,458	Permendagri No 050
Total	**36,912,318,719**	**43,432,438,198**	**39,367,204,259**	**27,688,102,827**	**32,434,242,047**	**19,538,645,486**	**31,840,912,600**	**36,439,357,486**	**23,638,652,924**	**-**	**53%**	**73%**	**93%**	**85%**	**0%**	**35,966,861,210**	**27,864,392,124**	

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan perkebunan Terhadap PDRB**		**Persentasi Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkkebunan Terhadap PDRB**							
		1. Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.1 Persentase Ketersediaan Pengembangan Sarana Pertanian							
			a). Jumlah produksi Tanaman Pangan Perkebunan	Ton						
			- Produksi Karet	Ton	75,902	83,732	86,345	89,643	92,145	92,235
			- Produksi Kelapa Sawit	Ton	311,192	364,235	379,253	382,234	384,732	394,560
			- Produksi Lada	Ton	816	875	912	943	975	990
			- Produksi Kopi	Ton	116	124	127	131	135	139
			- Produksi Kakao	Ton	28.3	34.5	36.5	38.7	40.7	43.3
			b). Luas Kebun Tanaman Perkebunan							
			- Luas Kebun Karet	Ha	95,935	97,674	98,935	98,935	99,345	99,925
			- Luas Kebun Kelapa Sawit	Ha	233,286	267,246	279,756	279,756	282,286	289,345
			- Luas Kebun Lada	Ha	1,912	2,212	2,515	2,515	2,618	2,672
			- Luas Kebun Kopi	Ha	500	650	730	730	760	780
			- Luas Kebun Kakao	Ha	525	680	760	760	790	825
		2. Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	a). Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	3	3.25	3.5	3.75	4.00	4.25
				%	5	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25
			b). Persentase ketersediaan Sarana Pertanian / Perkebuan	%	75	80	85	90	95	100
			c). Persentase ketersediaan Prasarana Pertanian / Perkebuan	%	75	80	85	90	95	100
			d). Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	50	60	70	80	90	100
		3. Meningkatnya Kesehatan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner	a) Terlaksananya pengendalian penyakit hewan strategis	%	10	20	25	26	28	35
			b). Terlaksananya Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Ton	3,793	3,865	4,789	4,856	4,998	5,134
			c). Penjaminan Ketersediaan bibit / benih Sapi	Ekor	28	32	35	41	44	48
			d) Penjaminan Ketersediaan bibit / benih Kambing dan domba	Ekor	30	34	38	45	46	59

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			e) Penjaminan Ketersediaan bibit / benih Babi	Ekor	116	123	150	200	213	235
			f) Penjaminan Ketersediaan bibit / benih Pakan Ternak	Stek	20,000	23,000	24,134	26,453	26,564	27,541
		4. Lahan Sawah , Lahan Kering dan Lahan Hortikultura	a). Pemetaan dan Penataan Tata Guna Lahan dan Sertifikasi	Ha	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
			b). Pemetaan dan Penataan Tata Guna Lahan dan Sertifikasi	Ha	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
			c). Pemetaan dan Penataan Tata Guna Lahan dan Sertifikasi	Ha	600	600	600	600	600	600
		5. Lahan Sawah , Lahan Kering dan Lahan Hortikultura	a). Penambahan Pupuk Organik Pola Tanam yan Sesuai	Ha	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
			Penambahan Pupuk Organik Pola Tanam yang Sesuai	Ha	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
			Penambahan Pupuk Organik Pola Tanam yang Sesuai	Ha	600	600	600	600	600	600
		6. Meningkatnya Penyuluh Pertanian	a). Persentase Penyuluh Pertanian	%	65	70	75	80	85	85
2.	**Menunjang urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Perkebunan yang baik dan bersih**	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.1 Persentase kualitas pelayanan (%)	%	100	100	100	100	100	100

TABEL 4.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Rukun, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026

MISI : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB	1. **Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	1. Meningkatkan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.1 Mendorong petani menerapkan GAP yang ditunjang dengan pendampingan oleh koperasi/PBS 1.2 Proyeksi pengembangan SDM Karet, Kelapa Sawit, Lada, Kopi dan kakao rakyat 1.3 Kapasitas SDM petani karet, kelapa sawit, lada, kopi dan kakao rakyat meningkat 1.4 Mendorong petani melakukan disverifikasi komoditas perkebunan rakyat 1.5 Mendorong Produktivitas perkebuan komoditi karet, Kelapa sawit, Lada, Kopi dan Kakao terutama perkebunan rakyat 1.6 Alokasi anggaran untuk pendidikan, pelatihan dan pendampingan peningkatan SDM 1.7 Mendorong Produksi Tanaman Perkebunan melalui Penerapan GAP
		2. Meningkatkan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.1 Terpenuhinya Sarana dan Prasaran pada perkebunan rakyat 2.2 Pengadaan Pupuk dan Pestisida untuk membantu petani meningkatkan produktivitas Tanaman Perkebunan 2.3 Pembinaan dan Pendampingan Pengembangan Bibit Unggul, Sarana Prasarana Perkebunan
		3. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan melalui kegiatan pembinaan pengembangan bibit unggul, sarana prasarana dan pengendalian hama dan penyakit tanaman	3.1 bertambahnya jumlah penggunaan bibit unggul bersertifikat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3.2 Melatih petani untuk menjadi penangkar dalam Menyediakan benih Unggul bersertifikat 3.3 Hama dan penyakit tanaman perkebunan yang terkendali 3.4 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
	2. **Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	1. Meningkatkan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Meningkatkan Pembangunan Prasarana Pertanian	1.1 Mengoptimalkan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 2.1 Pemanfaatan Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani 2.2 Pemeliharaan Embung yang sudah dibangun 2.3 Lancarnya Pendistribusian Hasil Panen Petani dengan Pemanfaatan Jalan Usaha Tani 2.4 Sistem Pengairan Melalui Pembangunan DAM Parit 2.5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage 2.6 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 2.7 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 2.8 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 2.9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
	3. **Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	1. Meningkatkan Kesehatan Ternak dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.1 Mengoptimalkan kinerja PUSKESWAN 1.2 Menambah petugas cek point di perbatasan Sarana dan prasarana serta obat - obatan menambah petugas peternakan 1.3 Memahamkan penanganan daging dari peternak sampai ke meja makan (from farm to the table) 1.4 Pembangunan sarana limbah RPUSK sesuai IPAL 1.5 Pengendalian dan penanggulangan pasca wabah penyakit hewan strategis (rabies ,ASF, antrax, flu burung, brucellosis)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Meningkatkan kebutuhan bibit/benih ternak dan pakan ternak yang berkualitas B9	2.1 Membangunan sarana dan prasarana rumah potong unggas 2.2 Menambah sarana dan prasarana RPH / RPU 2.3 Pembangunan pagar di lingkungan RPUSK mengkurai 2.4 Pemenuhan peralatan dan alat uji daging 2.5 Sosialisasi standart RPU/RPU serta menfasilitasi Tempat pemotongan ternak di tempat ibadah. 2.6 Penguatan modal kelompok tani dengan bibit/benih ternak yang berkualitas. 2.7 Memenuhi kebutuhan bibit / benih yang berkualitas 2.8 Terkendalinya lalulintas ternak, pengawasan ternak masuk dan keluar
	4. **Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	1. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.1 Tersedia informasi serangan Hama, Penyakit dan Bencana Perkebunan 1.2 Mengoptimalkan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani / kelompok Tani dalam Pengendalian Hama Penyakit. 1.3 Mendorong Petani dalam Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1.4 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1.5 Mengoptimalkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	5. **Meningkatnya Perizinan Usaha Pertanian**	1. Meningkatkan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.1 Menyusun Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 1.2 Mengoptimalkan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Perusahaan Perkebunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			1.3 Membina dan Mengawasi Setiap Perusahaan dalam Pemberian dan Penerapan Izin Usaha Pertanian dan Perkebunan
	6. **Meningkatnya Penyuluh Pertanian**	1. Meningkatkan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 1.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1.4 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 1.5 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota .1.6 Mendorong pelatihan teknis dan non teknis bagi penyuluh pertanian PNS, P3K dan penyuluh swadaya di tingkat kabupaten dan kecamatan
		2. Meningkatkan jumlah BPP dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kecamatan	3.1 Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa melalui operasional BPP dan penyuluh
		3. Meningkatkan jumlah dan kenaikan kelas tani dan gabungan kelompok tani	4.1 Memfasilitasi pengembangan kelompok tani dan Gapoktan untuk mandiri 4.2 Menambah Anggaran untuk menunjang sarana prasarana Penyuluhan 4.3 Penguatan kapasitas BPP di kecamatan dan Posluhdes di desa

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Sintang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Inkator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Out Put)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan perkebuna Terhadap PDRB		**Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB**	**3 27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																
	1. Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian**	**3 27 02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				**1,014,386,300**		**1,039,745,958**		**1,065,739,606**		**1,092,383,097**		**1,119,692,674**		**5,331,947,635**		
			3 27 02 2 01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**				**560,388,000**		**574,397,700**		**588,757,643**		**603,476,584**		**618,563,498**		**2,945,583,424**		
			3 27 02 2 01 01	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik	-Masukan Dana yang di Butuhkan -Keluaran - Jumlah Kelompok Tani - Pengadaan Bibit Kakao - Pengadaan Bibit Karet - Penagadan Bibit Kopi	8 Kecamatan 100 %	10 Poktan 1 PAKET 1 PAKET 1 PAKET 100 %	50,000,000	10 Poktan 1 PAKET 1 PAKET 1 PAKET 100 %	51,250,000	10 Poktan 1 PAKET 1 PAKET 1 PAKET 100 %	52,531,250	10 Poktan 1 PAKET 1 PAKET 1 PAKET 100 %	53,844,531	10 Poktan 1 PAKET 1 PAKET 1 PAKET 100 %	55,190,645	10 Poktan 1 PAKET 1 PAKET 1 PAKET 100 %	262,816,426	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 02 2 01 02	- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-Masukan -Keluaran - Jumlah Jalan Usaha Produks-Jumlah Mesin Pemotong Rumput - Jumlah Penangkar Benih yang di lakukan Pembinaan - Jumlah Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan - Pengadaan Alat Mesin Pompa Air	1 Kegiatan 1 Paket 100 % 5 Kecamatan 100 % 1 Kegiatan	1 Paket 100 %	510,388,000	1 Paket 100 %	523,147,700	1 Paket 100 %	536,226,393	1 Paket 100 %	549,632,052	1 Paket 100 %	563,372,854	1 Paket 100 %	2,682,766,998	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 02 2 02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		-												-		
			3 27 02 2 02 01 3 27 02 2 02 02 3 27 02 2 02 03	- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																
			3 27 02 2 03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		-												-		
			3 27 02 2 03 01 3 27 02 2 03 02	- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																
			3 27 02 2 04	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**		-												-		
			3 27 02 2 04 01 3 27 02 2 04 02	- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan - Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan																
			3 27 02 2 05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**		-		**18,998,300**		**19,473,258**		**19,960,089**		**20,459,091**		**20,970,568**		**99,861,306**		
			3 27 02 2 05 01	- Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Masukan Dana yang di Butuhkan **Keluaran :** Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota **Hasil** : Terlaksanannya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 laporan 100 %	18,998,300	1 laporan 100 %	19,473,258	1 laporan 100 %	19,960,089	1 laporan 100 %	20,459,091	1 laporan 100 %	20,970,568	1 laporan 100 %	99,861,306	DPP	Kab.Sintang
			3 27 02 2 05 02 3 27 02 2 05 03 3 27 02 2 05 04 3 27 02 2 05 05 3 27 02 2 05 06	- Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit - Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																
			3 27 02 2 06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**		-		**435,000,000**		**445,875,000**		**457,021,875**		**468,447,422**		**480,158,607**		**2,286,502,904**		
			3 27 02 2 06 01	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-Masukan Dana yang di Butuhkan -Keluaran Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari 1 Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Benih atau Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 Daerah Kabupaten atau Kota	1 Kegiatan	30 paket 100 %	435,000,000	30 paket 100 %	445,875,000	30 paket 100 %	457,021,875	30 paket 100 %	468,447,422	30 paket 100 %	480,158,607	30 paket 100 %	2,286,502,904	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 02 2 06 02	- Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																
	2. Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentase Ketersediaan Prasarana**	**3 27 03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				**2,290,000,000**		**2,347,250,000**		**2,405,931,250**		**2,466,079,531**		**2,527,731,520**		**12,036,992,301**		
			3 27 03 2 01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		-												-		
			3 27 03 2 01 01	- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		-														

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Inkator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Out Put)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3 27 03 2 01 02 3 27 03 2 01 03 3 27 03 2 01 04	- Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya - Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		- - -															
			3 27 03 2 02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**				**2,290,000,000**		**2,347,250,000**		**2,405,931,250**		**2,466,079,531**		**2,527,731,520**		**12,036,992,301**		
			3 27 03 2 02 01	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Masukan -Dana yang di Butuhkan -Keluaran Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian -Hasil Terlaksananya Pembangunan Prasaran Pertanian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	550,000,000	1 Kegiatan	563,750,000	1 Kegiatan	577,843,750	1 Kegiatan	592,289,844	1 Kegiatan	607,097,090	1 Kegiatan	2,890,980,684 -	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 03 2 02 02	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	-Masukan Keluaran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	205,000,000	1 Kegiatan	210,125,000	1 Kegiatan	215,378,125	1 Kegiatan	220,762,578	1 Kegiatan	1,051,265,703	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 03 2 02 03	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	- Masukan Keluaran - Jumlah Pembangunan dan Peningkatan JUT - Jumlah Pembangunan Pertanian Produktif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,335,000,000	1 Kegiatan	1,368,375,000	1 Kegiatan	1,402,584,375	1 Kegiatan	1,437,648,984	1 Kegiatan	1,473,590,209	1 Kegiatan	7,017,198,568	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 03 2 02 04 3 27 03 2 02 05 3 27 03 2 02 06 3 27 03 2 02 07 3 27 03 2 02 08	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya																	
			3 27 03 2 02 09	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	-Masukan -Keluaran - Jumlah Pembangunan Lanjutan Pertanian Produktif - Jumlah Pengadaan Alat Mesin Pertanian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	205,000,000	1 Kegiatan	210,125,000	1 Kegiatan	215,378,125	1 Kegiatan	220,762,578	1 Kegiatan	226,281,643	1 Kegiatan	1,077,547,346	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 03 2 03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**		-												-		
			3 27 03 2 03 01 3 27 03 2 03 02	- Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																
			3 27 03 2 04	**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**		-												-		
			3 27 03 2 04 01 3 27 03 2 04 02 3 27 03 2 04 03	- Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum - Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum - Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum																
	3. Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**3 27 04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		-		**41,496,300**		**42,533,708**		**43,597,050**		**44,686,976**		**45,804,151**		**218,118,185**		
			3 27 04 2 01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		-		**19,088,000**		**19,565,200**		**20,054,330**		**20,555,688**		**21,069,580**		**100,332,799**		
			3 27 04 2 01 01	- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	- Masukan Dana yang di Butuhkan - Keluaran 'Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	9 Kecamatan 100 %	14 Kecamatan	19,088,000	14 Kecamatan	19,565,200	14 Kecamatan	20,054,330	14 Kecamatan	20,555,688	14 Kecamatan	21,069,580	14 Kecamatan	100,332,799	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 04 2 01 02 3 27 04 2 01 03	- Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																
			3 27 04 2 02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**		-												-		
			3 27 04 2 02 01 3 27 04 2 02 02 3 27 04 2 02 03	- Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan - Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																	
			3 27 04 2 03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**		-												-		
			3 27 04 2 03 01 3 27 04 2 03 02	- Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																
			3 27 04 2 04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		-		**22,408,300**		**22,968,508**		**23,542,720**		**24,131,288**		**24,734,570**		**117,785,386**		
			3 27 04 2 04 01	- Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan																
			3 27 04 2 04 02	- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-Masukan Dana yang di Butuhkan - Keluaran Jumlah Peneapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	5 Kecamatan	22,408,300	5 Kecamatan	22,968,508	5 Kecamatan	23,542,720	5 Kecamatan	24,131,288	5 Kecamatan	24,734,570	5 Kecamatan	117,785,386	**DPP**	Kab.Sintang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Inkator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Out Put)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3 27 04 2 04 03	- Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis																
			3 27 04 2 04 04	- Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																
			3 27 04 2 05	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**		-												-		
			3 27 04 2 05 01	- Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan																
			3 27 04 2 05 02	- Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya																
	4. Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**3 27 05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		-		**1,467,736,000**		**1,499,429,400**		**1,536,821,578**		**1,575,337,546**		**1,614,622,693**		**7,693,947,217**		
			3 27 05 2 01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		-		**1,467,736,000**		**1,499,429,400**		**1,536,821,578**		**1,575,337,546**		**1,614,622,693**		**7,693,947,217**		
			3 27 05 2 01 01	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Masukan -Dana yang di Butuhkan Keluaran Jumlah Pengendalian Bencana Pertanian Kabupaten / Kota Hasil Terlaksananya Pengendalian dan Penaggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		100%	130,016,000	100%	133,266,400	100%	136,598,060	100%	140,013,012	100%	143,513,337	100%	683,406,808	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 05 2 01 02	- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Hasil Keluaran -Iuran Lingkar Temu Kabupaten Lestari -Keikut sertaan dalam Festival Kabupaten Lestari Pelatihan Komuditas Lestari - Pertemuan dengan Mitra LTKL - Rapat Umum dengan Mitra LTKL	3 Kecamatan 100%	1 Tahun 1 kali 1 kegiatan 1 kali 5 kali 1 kali	18,255,000	1 Tahun 1 kali 1 kegiatan 1 kali 5 kali 1 kali	18,711,375	1 Tahun 1 kali 1 kegiatan 1 kali 5 kali 1 kali	19,085,603	1 Tahun 1 kali 1 kegiatan 1 kali 5 kali 1 kali	19,658,171	1 Tahun 1 kali 1 kegiatan 1 kali 5 kali 1 kali	20,051,334	1 Tahun 1 kali 1 kegiatan 1 kali 5 kali 1 kali	95,761,482	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 05 2 01 03	- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Masukan Keluaran -Jumlah Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Vario 150 VIN 2019) -Jumlah Belanja Moda Komputer Jumlah Belanja Modal Topi Kerja - Jumlah Penanganan Kebakaran Lahan	-	1 Kegiatan	1,000,000,000	1 Kegiatan	1,020,000,000	1 Kegiatan	1,045,500,000	1 Kegiatan	1,071,637,500	1 Kegiatan	1,098,428,438	1 Kegiatan	5,235,565,938	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 05 2 01 04	- Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis																
			3 27 05 2 01 05	- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Masukan Keluaran '- Jumlah Ground Cek Hot Spot C/80% - Jumlah Identifikasi Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan - Jumlah Laporan Pertimbangan Teknis Perencanaan Lahan Eks Kebakaran	-	30 Kali 10 Kali 1 Dokum en 100 %	319,465,000	30 Kali 10 Kali 1 Dokum en 100 %	327,451,625	30 Kali 10 Kali 1 Dokum en 100 %	335,637,916	30 Kali 10 Kali 1 Dokum en 100 %	344,028,864	30 Kali 10 Kali 1 Dokum en 100 %	352,629,585	30 Kali 10 Kali 1 Dokum en 100 %	1,679,212,989	**DPP**	Kab.Sintang
	5. Meningkatnya Perizinan Usaha Pertanian	**Persentase Perizinan Usaha Pertanian**	**3 27 06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		-		**187,977,100**		**192,676,528**		**197,493,441**		**202,430,777**		**207,491,546**		**988,069,391**		
			3 27 06 2 01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		-		**187,977,100**		**192,676,528**		**197,493,441**		**202,430,777**		**207,491,546**		**988,069,391**		
			3 27 06 2 01 01	- Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																
			3 27 06 2 01 02	- Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Masukan Keluaran '-Jumlah Laporan - Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberiaan Pertimbangan Izin Usaha Pertanian	20 Perusahaan 100 %	1 dokumen 100 %	169,866,100	1 dokumen 100 %	174,112,753	1 dokumen 100 %	178,465,571	1 dokumen 100 %	182,927,211	1 dokumen 100 %	187,500,391	1 dokumen 100 %	892,872,025	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 06 2 01 03	- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Masukan Keluaran Jumlah Laporan - Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian - Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian - Jumlah Penunjang Kegiatan LTKL Jumlah Penunjang Sekretariat Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan - Jumlah Perusahaan yang di lakukan Penilaian Usaha Perkebunan	40 Perusahaan 100 %	1 KEGIATAN 1 DOKU MEN 7 KECAMATAN 45 PERUSAHAAN 3 KECAMATAN 45 PERUSAHAAN	18,111,000	1 KEGIATAN 1 DOKU MEN 7 KECAMATAN 45 PERUSAHAAN 3 KECAMATAN 45 PERUSAHAAN	18,563,775	1 KEGIATAN 1 DOKU MEN 7 KECAMATAN 45 PERUSAHAAN 3 KECAMATAN 45 PERUSAHAAN	19,027,869	1 KEGIATAN 1 DOKU MEN 7 KECAMATAN 45 PERUSAHAAN 3 KECAMATAN 45 PERUSAHAAN	19,503,566	1 KEGIATAN 1 DOKU MEN 7 KECAMATAN 45 PERUSAHAAN 3 KECAMATAN 45 PERUSAHAAN	19,991,155	1 KEGIATAN 1 DOKU MEN 7 KECAMATAN 45 PERUSAHAAN 3 KECAMATAN 45 PERUSAHAAN	95,197,366	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 06 2 02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**		-												-		
			3 27 06 2 02 01	- Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan																
			3 27 06 2 02 02	- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan																
			3 27 06 2 02 03	- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan																
			3 27 06 2 02 04	- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan																
			3 27 06 2 02 05	- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Inkator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Out Put)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3 27 06 2 03	**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**		-												-		
			3 27 06 2 03 01	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																
			3 27 06 2 03 02	- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																
	6. Meningkatnya Penyuluh Pertanian	**Persentase Penyuluh Pertanian**	**3 27 07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		-		**158,130,000**		**162,083,250**		**166,135,331**		**170,288,715**		**174,545,932**		**831,183,228**		
			3 27 07 2 01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		-		**158,130,000**		**162,083,250**		**166,135,331**		**170,288,715**		**174,545,932**		**831,183,228**		
			3 27 07 2 01 01	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Masukan Keluaran - Jumlah Angka Kredit Penyuluh yang dinilai - Jumlah BPP - Jumlah Penyuluh yang di Evaluasi	1 Kegiatan 14 BPP 1 Kegiatan 100 %	1 Kegiatan 14 BPP 1 Kegiatan 100 %	119,690,000	1 Kegiatan 14 BPP 1 Kegiatan 100 %	122,682,250	1 Kegiatan 14 BPP 1 Kegiatan 100 %	125,749,306	1 Kegiatan 14 BPP 1 Kegiatan 100 %	128,893,039	1 Kegiatan 14 BPP 1 Kegiatan 100 %	132,115,365	1 Kegiatan 14 BPP 1 Kegiatan 100 %	629,129,960	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 07 2 01 02	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Masukan Keluaran - Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan Penyuluh di Pertanian di Kecamatan dan Desa Hasil : Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1 Kegiatan 100 %	1 Kegiatan 100 %	18,720,000	1 Kegiatan 100 %	19,188,000	1 Kegiatan 100 %	19,667,700	1 Kegiatan 100 %	20,159,393	1 Kegiatan 100 %	20,663,377	1 Kegiatan 100 %	98,398,470	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 07 2 01 03	- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Masukan Keluaran - Jumlah Gedung BPP yang di renovasi - Terleksananya Kegaitan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di 14 Terlaksananya Perjalanan Penyuluh se Kabupaten Sintang	3 BPP 1 Kegiatan 14 Kecamatan	3 BPP 1 Kegiatan 14 Kecamatan	19,720,000	3 BPP 1 Kegiatan 14 Kecamatan	20,213,000	3 BPP 1 Kegiatan 14 Kecamatan	20,718,325	3 BPP 1 Kegiatan 14 Kecamatan	21,236,283	3 BPP 1 Kegiatan 14 Kecamatan	21,767,190	3 BPP 1 Kegiatan 14 Kecamatan	103,654,798	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 07 2 01 04	- Pembentukan Badan Usaha Milik Petani																
			3 27 07 2 01 05	- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																
	1. Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**3 27 01**	**PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		-		**16,783,357,071**		**17,202,940,998**		**17,632,837,436**		**18,073,658,372**		**18,525,499,832**		**88,218,293,709**		
			3 27 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		-		**15,501,829,307**		**15,889,375,040**		**16,286,609,416**		**16,693,774,651**		**17,111,119,017**		**81,482,707,431**		
			3 27 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-Masukan Dana Yang -Keluaran Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **-Hasil** Terlaksananya Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bln	14 Bln	15,472,756,307	14 Bln	15,859,575,215	14 Bln	16,256,064,595	14 Bln	16,662,466,210	14 Bln	17,079,027,865	70 Bln	81,329,890,192	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 02 02 3 27 01 2 02 03 3 27 01 2 02 04	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
			3 27 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-Masukan -Keluaran Jumlah Dokumen Laporan yan di Susun	-	5 Dokumen	8,836,000	5 Dokumen	9,056,900	5 Dokumen	9,283,323	5 Dokumen	9,515,406	5 Dokumen	9,753,291	25 Dokumen	46,444,919	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan																
			3 27 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-Masukan -Keluaran Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	3 Dokumen	10,116,800	3 Dokumen	10,369,720	3 Dokumen	10,628,963	3 Dokumen	10,894,687	3 Dokumen	11,167,054	15 Dokumen	53,177,224	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-Masukan -Keluaran Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	3 Dokumen	10,120,200	3 Dokumen	10,373,205	3 Dokumen	10,632,535	3 Dokumen	10,898,349	3 Dokumen	11,170,807	15 Dokumen	53,195,096	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		-		**27,478,000**		**28,164,950**		**28,869,074**		**29,590,801**		**30,330,571**		**144,433,395**		
			3 27 01 2 03 01 3 27 01 2 03 02 3 27 01 2 03 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
			3 27 01 2 03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-Masukan -Keluaran Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik **- Hasil** Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	27,478,000	1 Laporan	28,164,950	1 Laporan	28,869,074	1 Laporan	29,590,801	1 Laporan	30,330,571	5 Laporan	144,433,395	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Inkator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Out Put)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3 27 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			3 27 01 2 03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																
			3 27 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		-		**362,526,674**		**371,589,841**		**380,702,501**		**390,220,063**		**399,975,565**		**1,905,014,643**		
			3 27 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan -Keluaran -Jumah alat komponen instalasi listrik yang di sediakan	10 jenis 100 %	10 Jenis	3,498,000	10 Jenis	3,585,450	10 Jenis	3,498,000	10 Jenis	3,585,450	10 Jenis	3,675,086	10 Jenis	17,841,986	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			3 27 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			3 27 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan Keluran -Jumlah Bahan Bakar Minyak Sorlar - Jumlah Nasi Kotak Tersedia - Jumlah Snack Tersedia	680 liter 100 % 345 Kotak 345 Kotak 100 %	9 Jenis 680 LITER 345 KOTAK 345 KOTAK	27,190,774	9 Jenis 680 LITER 345 KOTAK 345 KOTAK	27,870,543	9 Jenis 680 LITER 345 KOTAK 345 KOTAK	28,567,307	9 Jenis 680 LITER 345 KOTAK 345 KOTAK	29,281,490	9 Jenis 680 LITER 345 KOTAK 345 KOTAK	30,013,527	9 Jenis 680 LITER 345 KOTAK 345 KOTAK	142,923,641	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan Keluaran -Jumlah Cetakan yang di sediakan - Jumlah Penggandaan - Jumlah Penjilidan	60 buku 47884 lembar 90 buah 100 %	60 buku 47884 lembar 90 BUAH	13,428,900	60 buku 47884 lembar 90 BUAH	13,764,623	60 buku 47884 lembar 90 BUAH	14,108,738	60 buku 47884 lembar 90 BUAH	14,461,457	60 buku 47884 lembar 90 BUAH	14,822,993	60 buku 47884 lembar 90 BUAH	70,586,710	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan Keluaran -Jumlah Majalah Yang di sediakan - Jumlah Surat Kabar Yang di sediakan	84 Bulan 24 Bulan 100 %	84 Jenis 24 Jenis	5,650,000	84 Jenis 24 Jenis	5,791,250	84 Jenis 24 Jenis	5,936,031	84 Jenis 24 Jenis	6,084,432	84 Jenis 24 Jenis	6,236,543	84 Jenis 24 Jenis	29,698,256	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material																
			3 27 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			3 27 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan Keluaran -Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100 kali 100 % 13 Orang 9 Orang 1 Orang 1 Orang 100 %	1 Dokumen	312,759,000	1 Dokumen	320,577,975	1 Dokumen	328,592,424	1 Dokumen	336,807,235	1 Dokumen	345,227,416	5 Dokumen	1,643,964,050	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
			3 27 01 2 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			3 27 01 2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		-												-		
			3 27 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			3 27 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau																
			3 27 01 2 07 03	Pengadaan Alat Besar																
			3 27 01 2 07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																
			3 27 01 2 07 05	Pengadaan Mebel																
			3 27 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			3 27 01 2 07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																
			3 27 01 2 07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud																
			3 27 01 2 07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			3 27 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			3 27 01 2 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			3 27 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**851,459,200**		**872,745,680**		**894,564,322**		**916,928,430**		**939,851,641**		**4,475,549,273**		
			3 27 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan Keluaran - Jumlah Amplop yang di Sediakan Jumlah Biaya Kode OTP -nJumlah Buku Cek Bank - Jumlah Materai 6000 yang di sediakan	270 lembar 40 buah 36 kotak 40 buah 100%	39 lembar 12 BULAN 4 BUAH 180 BUAH	4,341,000	39 lembar 12 BULAN 4 BUAH 180 BUAH	4,449,525	39 lembar 12 BULAN 4 BUAH 180 BUAH	4,560,763	39 lembar 12 BULAN 4 BUAH 180 BUAH	4,674,782	39 lembar 12 BULAN 4 BUAH 180 BUAH	4,791,652	39 lembar 12 BULAN 4 BUAH 180 BUAH	22,817,722	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan Keluaran - Jumlah Belanja Air - Jumlah Belanja Internet - Jumlah Belanja Listrik	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 %	12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN	132,000,000	12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN	135,300,000	12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN	138,682,500	12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN	142,149,563	12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN	145,703,302	12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN	693,835,364	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			3 27 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan Keluaran -Jumlah Belanja Modal Alat Pembersih - Jumlah Tenaga Honorer S1 - Jumlah Tenaga Honorer SLTA - Jumlah Tenaga Honorer SLTP	13 Orang 9 Orang 1 Orang 1 Orang 100 %	130 BUAH 16 ORANG 9 ORANG 1 ORANG	715,118,200	130 BUAH 16 ORANG 9 ORANG 1 ORANG	732,996,155	130 BUAH 16 ORANG 9 ORANG 1 ORANG	751,321,059	130 BUAH 16 ORANG 9 ORANG 1 ORANG	770,104,085	130 BUAH 16 ORANG 9 ORANG 1 ORANG	789,356,687	130 BUAH 16 ORANG 9 ORANG 1 ORANG	3,758,896,187	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		-		**40,063,890**		**41,065,487**		**42,092,124**		**43,144,428**		**44,223,038**		**210,588,967**		
			3 27 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			3 27 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan Keluaran - Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di KIR - Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di Bayar Pajak - Jumlah Kendaraan Roda 2 yang di Bayar Pajak Jumlah Kendaraan yang di ganti Suku Cadang	4 unit 4 unit 23 unit 100 %	31 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit	34,655,000	31 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit	35,521,375	31 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit	36,409,409	31 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit	37,319,645	31 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit	38,252,636	31 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit	182,158,065	**DPP**	Kab.Sintang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Inkator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Out Put)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3 27 01 2 09 03 3 27 01 2 09 04 3 27 01 2 09 05 3 27 01 2 09 06 3 27 01 2 09 07 3 27 01 2 09 08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
			3 27 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan Keluaran - Jumlah Cat Tembok Weathersheild dan sekelasnya - Jumlah Handle Pintu - Jumlah Kuas 4 Standar - Jumlah Minyak Cat	1 Paket	1 Paket	5,408,890	1 Paket	5,544,112	1 Paket	5,682,715	1 Paket	5,824,783	1 Paket	5,970,403	5 Paket	28,430,903	**DPP**	Kab.Sintang
			3 27 01 2 09 10 3 27 01 2 09 11 3 27 01 2 09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																	
Jumlah Total Anggaran						-		**21,943,082,771**		**22,486,659,840**		**23,048,555,693**		**23,624,865,013**		**24,215,388,348**	-			

PEMERINTAH DAERAH

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

TAHUN ANGGARAN : 2020

SKPD : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	URUSAN PILIHAN								
0303	Pertanian								
0303.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,347,100,897				709,402,950
0303.030301.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Jumlah Materai yang disediakan Keluaran : Jumlah Perangko yang disediakan Keluaran : Jumlah Amplop yang disediakan Keluaran : Jumlah Paket pengiriman surat yang disediakan Hasil : Tersedianya jasa surat menyurat untuk menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	270 lembar 40 buah 36 kotak 40 buah 100 %	4,457,500	Dana Alokasi Umum		270 lembar 40 buah 36 kotak 40 buah 100 %	4,903,250
0303.030301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah Pemakaian Jasa Listrik Keluaran : Jumlah Pemakaian Jasa Sumber Daya Air Keluaran : Jumlah Pemakaian Internet Hasil : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 %	61,521,828	Dana Alokasi Umum		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 %	676,740,100
0303.030301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah kendaraan roda 4 yang di KIR Keluaran : Jumlah kendaraan roda 4 yang dibayar pajak Keluaran : Jumlah kendaraan roda 2 yang dibayar pajak Hasil : Tersedianya surat menyurat kendaraan dinas/operasional yang dapat menunjang pelayanan admistrasi perkantoran		4 unit 4 unit 23 unit 100 %	12,000,000	Dana Alokasi Umum		4 unit 4 unit 23 unit 100 %	13,200,000
0303.030301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah bahan kebersihan yang disediakan Keluaran : Jumlah Tenaga Kebersihan Hasil : Tersedianya tenaga kebersihan, peralatan dan bahan kebersihan kantor yang dapat menunjang pelayanan administrasi kantor	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	30 jenis 7 orang 100 %	123,391,000	Dana Alokasi Umum		30 jenis 7 orang 100 %	124.464.500
0303.030301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Keluaran : Jumlah perlengkapan komputer yang disediakan Hasil : Tersedianya ATK dan Perlengkapan komputer yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	40 jenis 7 jenis 100 %	44,510,149	Dana Alokasi Umum		40 jenis 7 jenis 100 %	55.638.669

0303.030301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah Cetakan yang disediakan Keluaran : Jumlah Penggandaan/fotocopy yang disediakan Keluaran : Jumlah penjilidan Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dapat meninjanga pelayanan administrasi perkantoran Distanbun	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	60 buku 47884 lembar 90 buah 100 %	18,251,720	Dana Alokasi Umum		60 buku 47884 lembar 90 buah 100 %	22.815.000
0303.030301.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah alat komponen instalasi listrik yang disediakan Hasil : Tersedianya komponen listrik yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	10 jenis 100 %	1,999,800	Dana Alokasi Umum		10 jenis 100 %	2.499.750
0303.030301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	Keluaran : Jumlah Majalah yang di sediakan Keluaran : Jumlah Surat Kabar yang disediakan Hasil : Tersedianya Surat kabar dan Majalah yang dapat menunjang Pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	84 Bulan 24 Bulan 100 %	8,697,600	Dana Alokasi Umum		84 Bulan 24 Bulan 100 %	8.697.600
0303.030301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah nasi kotak tersedia Keluaran : Jumlah snack tersedia Hasil : Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor	Dinas Pertanian dan Perkebunan	345 Kotak 345 Kotak 100 %	15,076,500	Dana Alokasi Umum		0 Kotak 0 Kotak 0 %	15.076.500
0303.030301.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah konsultasi keluar kabupaten Hasil : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran Distanbun	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	50 kali 100 %	343,030,000	Dana Alokasi Umum		50 kali 100 %	287.600.000
0303.030301.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah pembinaan kedalam daerah Hasil : Terlaksananya pembinaan kedalam daerah untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran Distanbun	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten SIntang	100 kali 100 %	225,910,000	Dana Alokasi Umum		100 kali 100 %	323.575.000
0303.030301.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	Keluaran : Jumlah Tenaga Kontrak S-1 Keluaran : Jumlah Tenaga Kontrak SLTA Keluaran : Jumlah Tenaga Kontrak SLTP Keluaran : Jumlah THL-TBPP S-1 Hasil : Tersedianya Tenaga Kontrak Pendukung Operasional, Keamanan dan Tenaga Teknis (THL-TBPP) untuk menunjang pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	13 Orang 9 Orang 1 Orang 1 Orang 100 %	475,018,800	Dana Alokasi Umum		0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 %	374.466.470
0303.030301.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	Keluaran : Jumlah bahan bakar minyak solar Hasil : Tersedianya bahan bakar minyak (BBM) yang dapat menunjang tugas pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Pertanian dan Perkebunan	680 liter 100 %	13,236,000	Dana Alokasi Umum		680 liter 100 %	14559600
0303.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**623,720,000**				**658,482,000**

0303.030301.02.002	**Pembangunan Gedung Kantor**	Keluaran : Jumlah Toilet Baru, Jumlah Rehab toilet Hasil : Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang pekerjaan	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Unit 2 Unit 100 %	**225,000,000**	(Dana Alokasi Umum)		1 Unit 2 Unit 100 %	**247,500,000**
0303.030301.02.011	**Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer**	Keluaran : Jumlah Pengadaan Laptop Hasil : Terlaksananya perlengkapan guna menunjang administrasi kantor	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Unit 100 %	**25,100,000**	(Dana Alokasi Umum)		1 Unit 100 %	**7,832,000**
0303.030301.02.012	**Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Keluaran : Jumlah Pengadaan Laptop Hasil : Terlaksananya perlengkapan guna menunjang administrasi kantor	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Unit 100 %	**3,500,000**	(Dana Alokasi Umum)		1 Unit 100 %	**3,850,000**
0303.030301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah kendaraan yang diservis Keluaran : Jumlah Kendaraan yang diganti suku cadang Keluaran : Jumlah kendaraan yang memakai bahan pelumas Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinass/operasional yang dapat menunjang tugas	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	2 unit 2 unit 2 unit 100 %	38,000,000	Dana Alokasi Umum		2 unit 2 unit 2 unit 100 %	41,800,000
0303.030301.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	Keluaran : Jumlah pemeliharaan PC Keluaran : Jumlah pemeliharaan laptop Keluaran : Jumlah pemeliharaan printer Hasil : Tersedianya perangkat komputer PC, Laptop, dan Printer yang dapat menunjang tugas aparatur	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten SIntang	2 unit 3 unit 6 unit 100 %	7,120,000	Dana Alokasi Umum		2 unit 3 unit 6 unit 100 %	8.900.000
0303.030301.02.045	Penataan Halaman Kantor	Masukan : Dana/ Anggaran Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten SIntang	2 unit 3 unit 6 unit 100 %	325,000,000	Dana Alokasi Umum		2 unit 3 unit 6 unit 100 %	357,500,000
0303.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**190,755,000**				
0303.030301.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Keluaran : Jumlah Pelatihan Yang Diikuti Hasil : Terselenggaranya Pelatihan Untuk Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten SIntang	6 Kegiatan 100 %	190,755,000	Dana Alokasi Umum		15 Kegiatan 100 %	209,830,500
0303.030301.05.004	Penilaiaan Angka Kredit				80,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	88,000,000
0303.15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**				**896,646,760**				981,310,836
0303.030301.15.006	Pengembangan Kemitraan Kelembangaan Petani Pekebun	Masukan - Keluaran : Meningkatkan Kemitraan Kelembagaan Petani Pekebun dengan Perusahaan	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	7 Kecamatan 100 %	76,547,590	Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	84,202,349
0303.030301.15.007	Penilaian petani berprestasi tingkat kabupaten	Masukan - Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	1 Kegiatan	91,630,400	Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	100,793,440

0303.030301.15.008	Penetapan Indeks Kabupaten	Masukan - Keluaran : Terbentuknya Daftar Harga Indeks Kabupaten	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang		28,488,000	Dana Alokasi Umum		6 Dokumen 100 %	31,336,800
0303.030301.15.009	Pengembangan wawasan petani dan penyuluh	Masukan - Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	1 Kegiatan	150,000,000	Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	160,000,000
0303.030301.15.012	Kegiatan Operasional 12 BPP	Masukan - Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	1 Kegiatan	249,980,770	Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	274,978,247
0303.030301.15.013	Kunjungan lapangan petani dan penyuluh			1 Kegiatan	300,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	330,000,000
0303.16	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan**				**8,278,564,100**				
0303.030301.16.032	Pengelolan Lahan dan Air		Dinas Pertanian dan Perkebunan		**8,051,000,000**	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	**8,856,100,000**
0303.030301.16.033	Pengawasan kebijakan subsidi pertanian	Terlaksananya pengawasan kebijakan subsidi petanian di kabupaten sintang	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Paket 100 %	**179,344,500**	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	**197,278,950**
0303.030301.16.035	Penyusunan angka ramalan (ARAM) padi dan palawija	Tersusunnya buku angka ramalan (ARAM) padi dan palawija	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Paket 100 %	**48,219,600**	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	**53,041,560**
0303.19	**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**				**2,486,513,420**				**2,735,164,756**
303,030,301,019,007	Pemeliharaan kebun bibit lada	Masukan - Keluaran :-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	**50,680,000**	Dana Alokasi Umum			**55,748,000**
303,030,301,019,008	Pengembangan Usaha Perkebunan	Masukan - Keluaran : Jumlah pembinaan kinerja perusahaan perkebunan besar	Dinas Pertanian dan Perkebunan	45 Perusahaan 100 %	**49,500,000**	Dana Alokasi Umum			**54,450,000**
303,030,301,019,009	Pengembangan perlindunagan tanaman perkebunan	Masukan - Keluaran : Jumlah pembinaan kegiatan pengembangan perlindungan tanaman perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan	5 Kecamatan 100 %	**62,954,960**	Dana Alokasi Umum			**69,250,450**
303,030,301,019,010	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Masukan - Keluaran : Jumlah Sarana yang di sediakan	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Paket 100 %	**41,200,000**	Dana Alokasi Umum			**45,320,000**
303,030,301,019,011	Pembinaan dan Pendampingan Pengembangan bibit unggul Pertanian dan Perkebunan	Masukan - Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	**86,389,900**	Dana Alokasi Umum			**95,028,890**
303,030,301,019,013	Penilaian Usaha Perkebunan	Masukan - Keluaran : Jumlah Perusahaan Perkebuanan Yang dinilai	Dinas Pertanian dan Perkebunan	20 Perusahaan 100 %	**72,500,000**	Dana Alokasi Umum			**79,750,000**
0303.030301.19.014	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk tanaman pangan berkelanjutan	Masukan - Dana / Anggaran Keluaran - Jumlah DAM Parit - Jumlah DAM Parit - Jumlah Sumur Bor - Jumlah Pintu Air - Jumlah Pengadaan kendaraan Operasional roda 2 untuk penuluh pertanian PNS Jumlah Pembangunan BPP - Jumlah Pembangunan BPP - Jumlah Meubeller untuk BPP - Jumlah Sarana Pemetaan/sarana keinformasian penyuluh	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Paket 2 Paket 2 Paket	**1,800,000,000**	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	**1,980,000,000**
303,030,301,019,016	Penunjang Kegiatan Forum Lingkar Temu Kabupaten Sintang	Masukan - Keluaran : Melaksanakan Kegiatan Forum Lingkar Temu Kabupagen Lestari	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3 Kecamatan 100 %	**100,000,000**	Dana Alokasi Umum			**110,000,000**

303,030,301,019,018	Pembinaan dan pendampingan pembangunan perkebunan Rakyat	Masukan - Keluaran :Jumlah kelompok tani yang dilakukan pembinaan dan pendampingan untuk pembangunan perkebunan Rakyat	Dinas Pertanian dan Perkebunan	8 Kecamatan 100 %	**70,165,300**	Dana Alokasi Umum			**77,181,830**
303,030,301,019,022	Pengadaan bibit tanaman Kakao	Masukan - Keluaran : Jumlah Bibit Tanaman Kakao	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	**103,123,260**	Dana Alokasi Umum			**113,435,586**
303,030,301,019,024	Penunjang Sekretariat Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang	Masukan - Keluaran : Melaksanakan Penunjang Sekretariat Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	**50,000,000**	Dana Alokasi Umum			**55,000,000**
0303.20	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**				**1,348,943,450**				**1,483,837,795**
0303.030301.20.004	Penyusunan program penyuluhan kabupaten sintang	Masukan - Keluaran : Jumlah dokumen programa penyuluhan kabupaten sintang	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	97,189,600	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	106,908,560
0303.030301.20.005	Monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan (RKT) penyuluh	Masukan - Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	366,753,850	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	403,429,235
0303.030301.20.008	Penilaian penyuluh PNS dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian teladan tingkat	Masukan - Dana/Anggaran Keluaran - Jumlah pelaksanaan penilaian penyuluh PNS dan Tenaga bantu penyuluh pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	50,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Kali 100%	55,000,000
0303.030301.20.009	Pelatihan petanidan Penyuluh	Masukan - Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	150,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	165,000,000
0303.030301.20.010	Kaji Terap Petani dan Penyuluh	Masukan - Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	150,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	165,000,000
0303.030301.20.013	Pameran Expo produk unggulan pertanian	Masukan - Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	170,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	187,000,000
0303.030301.20.014	Peringatan hari krisda pertanian	Masukan - Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	120,000,000	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	132,000,000
0303.030301.20.015	Peningkatan kapasitas SDM	Masukan - Keluaran -	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	**95,000,000**	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	**104,500,000**
0303.030301.20.016	Pendampingan pelaksanaan sistem kerja LAKUSUSI	Masukan - Keluaran -	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	**150,000,000**	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	**165,000,000**
0303.21	**Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**				**223,996,000**				**246,395,600**
303,030,301,021,006	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies	Masukan - Keluaran :Jumlah Kecamatan yang dilayani	Dinas Pertanian dan Perkebunan	9 Kecamatan 100 %	**223,996,000**	Dana Alokasi Umum			**246,395,600**
0303.22	**Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan**				**3,312,770,000**				**3,644,047,000**
303,030,301,022,002	Pembibitan dan perawatan Ternak	Masukan - Keluaran :-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan	**1,050,000,000**	Dana Alokasi Umum			**1,155,000,000**

303,030,301,022,003	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Masukan - Keluaran : Jumlah bibit sapi yang diberikan Jumlah bibit sapi yang dapat meningkatan hasil peternakan	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	**1,790,000,000**	Dana Alokasi Umum			**1,969,000,000**
303,030,301,022,010	Pengembangan Ternak Sapi	Masukan - Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	**232,840,000**	Dana Alokasi Umum			**256,124,000**
303,030,301,022,011	Pengembangan kambing Etawa	Masukan - Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	**239,930,000**	Dana Alokasi Umum			**263,923,000**
0303.25	**Program Pembangunan Perkebunan**				**2,125,000,000**				**2,337,500,000**
303,030,301,025,001	Pembangunan perkebunan rakyat	Masukan - Keluaran : -	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	**2,125,000,000**	Dana Alokasi Umum			**2,337,500,000**
0405.24	**Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah**				**39,253,420**				**43,178,762**
0303.030301.24.018	Pameran pembangunan	Masukan - Keluaran Terselenggaranya pameran pembangunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	**30,712,520**	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	**33,783,772**
0303.030301.24.021	Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Masukan - Keluaran Penyelenggaraan Pawai Pembangunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1 Kegiatan	**8,540,900**	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	**9,394,990**

Sintang, 2020
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sintang

Ir. Elisa Gultom, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661103 199503 1 003

ANGGARAN DINAS PERTANIAN TA 2020 terdiri dari : -

1	DAU	2,100,000,000	
2	HONOR TENAGA KONTRAK	374,466,470	
3	DAK	3,704,353,000	
4	DBH - DR	1,229,991,350	
	JUMLAH -------		7,408,810,820

(7,408,810,820)

kegiatan :

I Sekretariat **#REF!**

1	Penyediaan jasa surat menyurat	4,457,500
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	61,521,828
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12,000,000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	123,391,000
5	Penyediaan alat tulis kantor	44,510,149

	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,251,720			
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,999,800			
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,697,600			
	9	Penyediaan makanan dan minuman	15,076,500			
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	343,030,000			
	11	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	225,910,000			
	12	Penyediaan tenaga kontrak	475,018,800			
	13	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	13,236,000			
	14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38,000,000			
	15	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	7,120,000			
	16	Pendidikan dan pelatihan formal	190,755,000			
	17	#REF!	#REF!			
	18	#REF!	#REF!			
II		Bidang Penyuluhan		**#REF!**	#REF!	
	1	Pameran Expo produk unggulan pertanian	-			
	2	#REF!	#REF!			
	3	#REF!	#REF!			
	4	#REF!	91,634,000			
	5	#REF!	#REF!			
III		Bidang Pengembangan Perkebunan		**#REF!**	#REF!	
	1	Kunjungan lapangan petani dan penyuluh	300,000,000			
	2	#REF!	#REF!			
	3	#REF!	#REF!			
	4	#REF!	#REF!			
	5	#REF!	#REF!			
	6	#REF!	-			
IV		Bidang Tanaman Pangan dan Horti		**#REF!**	#REF!	
	1	#REF!	#REF!			
	2	#REF!	#REF!			
V		Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan		**#REF!**	#REF!	
	1	#REF!	#REF!			
	2	#REF!	#REF!			
	3	#REF!	#REF!			
	4	#REF!	#REF!			
VI		Bidang Peternakan dan Keswan		**#REF!**	#REF!	
	1	#REF!	#REF!			
				#REF!		**#REF!**
#		Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan		**#REF!**		
	1	#REF!	#REF!			
	2	#REF!	#REF!			
#		Bidang Tanaman Pangan dan Horti		**#REF!**		
	1	#REF!	#REF!			
				#REF!	#REF!	
				7,408,810,820		
				#REF!		
	39	Keg		58,704,730		
				#REF!		**#REF!**

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN									
RPJMD									
1.1	Produksi Padi (Ton/Thn)	87,078	91,431	94,174	97,941	102,838	106,952	110,160	110,160
1.2	Produksi Jagung (Ton/Thn)	3,449	3,621	3,766	3,879	4,073	4,236	4,363	4,363
1.3	Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan Terhadap PDR B (%)	28.93	30.36	31.27	32.83	34.47	35.85	36.92	36.92
1.4	Produksi Karet (Ton/Thn)	39,269	41,232	42,462	44,160	46,368	48,222	49,668	49,668
1.5	Produksi Kelapa Sawit (Ton/Thn)	323,704	339,889	353,485	379,253	398,216	414,145	426,569	426,569
1.6	Produksi Lada (Ton/Thn)	878	922	950	988	1,037	1,078	1,110	1,110
1.7	Tingkat Pengggunaan Benih Unggul Karet (%)	85	89	92	96	1001	1041	1072	1072
1.8	Tingkat Penggunaan Benih Unggul Kelapa Sawit Rakyat (%)	70	74	77	81	86	89	92	92
1.9	Produksi Kakao (Ton/Thn)	28.3	29.7	30.6	31.8	33.4	34.7	35.7	35.7
1.10	Produksi Kopi (Ton/Thn)	83	87	90	94	98	102	105	105
1.11	Produksi Peternakan (Ton/Thn)	4,960	5,208	5,364	5,579	5,858	6,092	6,275	6,275
1.12	Luas Kebun								
1.12.1	Luas Kebun Karet (Ha)	95,936	96,935	97,674	98,256	98,935	99,354	99,925	99,925
1.12.2	Luas Kebun Kelapa Sawit (Ha)	233,286	244,950	255,299	265,511	278,787	289,938	298,636	298,636
1.12.3	Luas Kebun Lada (Ha)	1,918	2,014	2,074	2,157	2,265	2,356	2,427	2,427
1.12.4	Luas Kebun Kakao (Ha)	525	551	568	591	621	646	665	665
1.12.5	Luas Kebun Kopi (Ha)	500	525	563	586	615	640	659	659
RENSTRA									

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Masukan Dana yang di Butuhkan -Keluaran - Jumlah Kelompok Tani - Pengadaan Bibit Kakao - Pengadaan Bibit Karet - Penagadan Bibit Kopi	2,685,000	2,685,671	2,686,343	2,687,014	2,687,686	2,688,358	2,689,030	2,689,702
	-Masukan -Keluaran - Jumlah Jalan Usaha Produks-Jumlah Mesin Pemotong Rumput - Jumlah Penangkar Benih yang di lakukan Pembinaan - Jumlah Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan - Pengadaan Alat Mesin Pompa Air	1,623,148,915	1,623,554,702	1,623,960,591	1,624,366,581	1,624,772,673	1,625,178,866	1,625,585,161	1,625,991,557
	Masukan Dana yang di Butuhkan Keluaran -Keluaran Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - Hasil Terlaksanannya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan dalam Daerah Kabupaten/Kota	249,755,000	249,817,439	249,879,893	249,942,363	250,004,849	250,067,350	250,129,867	250,192,399
	-Masukan Dana yang di Butuhkan -Keluaran Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari 1 Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Benih atau Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 Daerah Kabupaten atau Kota	1,126,180,000	1,126,461,545	1,126,743,160	1,127,024,846	1,127,306,602	1,127,588,429	1,127,870,326	1,128,152,294
	Masukan -Dana yang di Butuhkan -Keluaran Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian -Hasil Terlaksananya Pembangunan Prasaran Pertanian	2,000,000,000	2,000,500,000	2,001,000,125	2,001,500,375	2,002,000,750	2,002,501,250	2,003,001,876	2,003,502,626
	Masukan Keluaran - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1,000,000,000	1,000,250,000	1,000,500,063	1,000,750,188	1,001,000,375	1,001,250,625	1,001,500,938	1,001,751,313
	- Masukan Keluaran - Jumlah Pembangunan dan Peningkatan JUT - Jumlah Pembangunan Pertanian Produktif	2,721,969,500	2,722,649,992	2,723,330,655	2,724,011,488	2,724,692,490	2,725,373,664	2,726,055,007	2,726,736,521

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Masukan -Keluaran - Jumlah Pembangunan Lanjutan Pertanian Produktif - Jumlah Pengadaan Alat Mesin Pertanian	766,888,540	767,080,262	767,272,032	767,463,850	767,655,716	767,847,630	768,039,592	768,231,602
	- Masukan Dana yang di Butuhkan - Keluaran 'Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	156,951,000	156,990,238	157,029,485	157,068,743	157,108,010	157,147,287	157,186,574	157,225,870
	-Masukan Dana yang di Butuhkan - Keluaran Jumlah Peneapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	0.00	40,301,000	40,401,753	40,502,757	40,604,014	40,705,524	40,807,288	40,909,306
	Masukan -Dana yang di Butuhkan Keluaran Jumlah Pengendalian Bencana Pertanian Kabupaten / Kota Hasil 'Terlaksananya Pengendalian dan Penaggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	300,000,000	300,075,000	300,150,019	300,225,056	300,300,113	300,375,188	300,450,281	300,525,394
	Hasil Keluaran '-Iuran Lingkar Temu Kabupaten Lestari -Keikut sertaan dalam Festival Kabupaten Lestari Pelatihan Komuditas Lestari - Pertemuan dengan Mitra LTKL - Rapat Umum dengan Mitra LTKL	22,554,850	22,560,489	22,566,129	22,571,770	22,577,413	22,583,058	22,588,703	22,594,351
	Masukan Keluaran '-Jumlah Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Vario 150 VIN 2019) -Jumlah Belanja Moda Komputer Jumlah Belanja Modal Topi Kerja - Jumlah Penanganan Kebakaran Lahan	0.00	1,000,000,000	1,002,500,000	1,005,006,250	1,007,518,766	1,010,037,563	1,012,562,656	1,015,094,063
	Masukan Keluaran '- Jumlah Ground Cek Hot Spot C/80% - Jumlah Identifikasi Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan - Jumlah Laporan Pertimbangan Teknis Perencanaan Lahan Eks Kebakaran	0.00	319,458,700	320,257,347	321,057,990	321,860,635	322,665,287	323,471,950	324,280,630
	Masukan Keluaran '-Jumlah Laporan - Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberiaan Pertimbangan Izin Usaha Pertanian	35,410,000	35,418,853	35,427,707	35,436,564	35,445,423	35,454,285	35,463,148	35,472,014

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masukan Keluaran Jumlah Laporan - Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian - Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian - Jumlah Penunjang Kegiatan LTKL Jumlah Penunjang Sekretariat Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan - Jumlah Perusahaan yang di lakukan Penilaian Usaha Perkebunan	0.00	71,349,000	71,349,000	71,349,000	71,349,000	71,349,000	71,349,000	71,349,000
	Masukan "Keluaran - Jumlah Angka Kredit Penyuluh yang dinilai - Jumlah BPP - Jumlah Penyuluh yang di Evaluasi	314,188,450	314,266,997	314,345,564	314,424,150	314,502,756	314,581,382	314,660,027	314,738,692
	Masukan Keluaran - Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan Penyuluh di Pertanian di Kecamatan dan Desa Hasil : Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	250,650,350	250,713,013	250,775,691	250,838,385	250,901,094	250,963,820	251,026,561	251,089,317
	Masukan Keluaran - Jumlah Gedung BPP yang di renovasi - Terleksananya Kegaitan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di 14 Terlaksananya Perjalanan Penyuluh se Kabupaten Sintang	543,908,510	544,044,487	544,180,498	544,316,543	544,452,623	544,588,736	544,724,883	544,861,064
	-Masukan Dana yang dibutuhkan -Keluaran Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN -Hasil	14,860,381,315	14,864,096,411	14,867,812,435	14,871,529,388	14,875,247,270	14,878,966,082	14,882,685,824	14,886,406,495
	-Masukan -Keluaran Jumlah Dokumen Laporan yan di Susun	9,500,000	9,502,375	9,504,751	9,507,127	9,509,504	9,511,881	9,514,259	9,516,637
	-Masukan -Keluaran Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan	8,200,000	8,202,050	8,204,101	8,206,152	8,208,203	8,210,255	8,212,308	8,214,361

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Masukan -Keluaran Jumlah Penyusunan Pelaporan dan	8,200,000	8,202,050	8,204,101	8,206,152	8,208,203	8,210,255	8,212,308	8,214,361
	-Masukan -Keluaran Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD - Hasil Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintah Daerah	70,220,000	70,237,555	70,255,114	70,272,678	70,290,246	70,307,819	70,325,396	70,342,977
	Masukan -Keluaran -Jumah alat komponen instalasi listrik yang di sediakan	3,500,000	3,500,875	3,501,750	3,502,626	3,503,501	3,504,377	3,505,253	3,506,130
	Masukan Keluran -Jumlah Bahan Bakar Minyak Sorlar - Jumlah Nasi Kotak Tersedia - Jumlah Snack Tersedia	31,846,149	31,854,111	31,862,074	31,870,040	31,878,007	31,885,977	31,893,948	31,901,922
	Masukan Keluaran -Jumlah Cetakan yang di sediakan - Jumlah Penggandaan - Jumlah Penjilidan	18,251,720	18,256,283	18,260,847	18,265,412	18,269,979	18,274,546	18,279,115	18,283,684
	Masukan Keluaran -Jumlah Majalah Yang di sediakan - Jumlah Surat Kabar Yang di sediakan	4,874,400	4,875,619	4,876,838	4,878,057	4,879,276	4,880,496	4,881,716	4,882,937
	Masukan Keluaran -Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	456,220,000	456,334,055	456,448,139	456,562,251	456,676,391	456,790,560	456,904,758	457,018,984
	Masukan Keluaran - Jumlah Amplop yang di Sediakan Jumlah Biaya Kode OTP -nJumlah Buku Cek Bank - Jumlah Materai 6000 yang di sediakan	4,457,500	4,458,614	4,459,729	4,460,844	4,461,959	4,463,075	4,464,190	4,465,306

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masukan Keluaran - Jumlah Belanja Air - Jumlah Belanja Internet - Jumlah Belanja Listrik	61,521,828	61,537,208	61,552,593	61,567,981	61,583,373	61,598,769	61,614,168	61,629,572
	Masukan Keluaran -Jumlah Belanja Modal Alat Pembersih - Jumlah Tenaga Honorer S1 - Jumlah Tenaga Honorer SLTA - Jumlah Tenaga Honorer SLTP	598,409,800	598,559,402	598,709,042	598,858,720	599,008,434	599,158,186	599,307,976	599,457,803
	Masukan Keluaran - Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di KIR - Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di Bayar Pajak - Jumlah Kendaraan Roda 2 yang di Bayar Pajak Jumlah Kendaraan yang di ganti Suku Cadang	12,000,000	12,003,000	12,006,001	12,009,002	12,012,005	12,015,008	12,018,011	12,021,016
	Masukan Keluaran - Jumlah Cat Tembok Weathersheild dan sekelasnya - Jumlah Handle Pintu - Jumlah Kuas 4 Standar -Jumlah Minyak Cat	426,230,000	426,336,558	426,443,142	426,549,752	426,656,390	426,763,054	426,869,745	426,976,462

TABEL 7.1